



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
2024

KATA PENGANTAR



Ir Ririn Sugihariyati
Kepala PPN Prigi

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun untuk melaporkan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Periode Tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mempunyai peran sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pelaporan kinerja di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan capaian kinerja pada periode berikutnya dapat lebih ditingkatkan, baik pelaksanaan tugas dan fungsi maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Trenggalek, 10 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi



Ririn Sugihariyati

DAFTAR ISI



	Page
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Aspek Strategis	5
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024	6
2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8
2.3. Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
2.4. Target Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2. Analisis Capaian Kinerja	14
3.3. Akuntabilitas Keuangan	66
BAB IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	69
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL



	Page
Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024	10
Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024	13
Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi” Tahun 2024	14
Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Tahun 2024	15
Tabel 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi”	17
Tabel 6. Capaian IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” Tahun 2024	19
Tabel 7. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi”	21
Tabel 8. Capaian IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa / Dievaluasi di PPN Prigi” Tahun 2024	22
Tabel 9. Penghitungan Capaian Kinerja Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa / Dievaluasi di PPN Prigi	22
Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa / Dievaluasi di PPN Prigi”	24
Tabel 11. Capaian IK “Tingkat Kinerja PPN Prigi” Tahun 2024	25
Tabel 12. Capaian Tingkat Kinerja PPN Prigi Per Bulan Tahun 2024	25
Tabel 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kinerja PPN Prigi”	27
Tabel 14. Capaian IK “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Prigi” Tahun 2024	28
Tabel 15. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran per Indikator	28
Tabel 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Prigi” Tahun 2024	30
Tabel 17. Capaian IK “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi” Tahun 2024	31
Tabel 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi” Tahun 2024	32
Tabel 19. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Prigi” Tahun 2024	33
Tabel 20. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Prigi”	35
Tabel 21. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2024	35
Tabel 22. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan”	37
Tabel 23. Capaian IK “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan” Tahun 2024	38
Tabel 24. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan”	39

	Page
Tabel 25. Capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi” Tahun 2024	40
Tabel 26. Nilai Capaian PM ZI Tahun 2024	41
Tabel 27. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai PM ZI PPN Prigi”	43
Tabel 28. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Prigi” Tahun 2024	44
Tabel 29. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di PPN Prigi	44
Tabel 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Prigi”	46
Tabel 31. Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi” Tahun 2024	47
Tabel 32. Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi Tahun 2024	47
Tabel 33. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi” ...	48
Tabel 34. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi” Tahun 2024	49
Tabel 35. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi”	51
Tabel 36. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa PPN Prigi” Tahun 2024 ...	52
Tabel 37. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Eselon I	53
Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa”	28
Tabel 39. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN” Tahun 2024	55
Tabel 40. Hasil Pengukuran “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN” Eselon I	55
Tabel 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN”	56
Tabel 42. Aspek IKPA dan Sasaran Perbaikan Kinerja	57
Tabel 43. Capaian IK “Nilai IKPA PPN Prigi” Tahun 2024	57
Tabel 44. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai IKPA PPN Prigi”	59
Tabel 45. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Prigi” Tahun 2024	60
Tabel 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PPN Prigi”	61
Tabel 47. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Prigi” Tahun 2024	62
Tabel 48. Detail Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per Unsur	62
Tabel 49. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Prigi”	65
Tabel 50. Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2024	66
Tabel 51. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024	66

DAFTAR GAMBAR



	Page
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	4
Gambar 2. <i>Dashboard</i> Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	12
Gambar 3. Realisasi PNBP Non SDA per Jenis Jasa di PPN Prigi	15
Gambar 4. Realisasi PNBP Non SDA per Bulan Tahun 2024	16
Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP Non SDA Tahun 2019-2024	16
Gambar 6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanah dan Bangunan serta Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Tambat Labuh	18
Gambar 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi Tahun 2024	19
Gambar 8. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 - 2024	20
Gambar 9. Kegiatan Pembongkaran Ikan dan Enumerasi Perikanan Tangkap di PPN Prigi ..	21
Gambar 10. Kegiatan Pemaparan dan Pembahasan Proposal Permohonan Penggunaan Bangunan, Penandatanganan Kontrak, dan Fasilitas Penyelesaian Permasalahan / Hambatan Pelaku Usaha	24
Gambar 11. Perbandingan nilai Tingkat Kinerja PPN Prigi Tahun 2019 - 2024	26
Gambar 12. Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap, Sosialisasi Peraturan Tata Kelola Pengawasan Kapal dan Gerai Buku Pelaut	29
Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan, Penimbangan Sampah Laut, serta Uji Kualitas Udara, Air Laut, dan Air Limbah di PPN Prigi	34
Gambar 14. Penerbitan SKKP PPN Prigi per Pelabuhan Perikanan Tahun 2024	36
Gambar 15. Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan SKKP	37
Gambar 16. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan	39
Gambar 17. Perbandingan Capaian Nilai PM ZI Tahun 2020 - 2024	42
Gambar 18. Kegiatan Pemantauan ZI WBK dan Penilaian ZI WBK	43
Gambar 19. Kegiatan Pengawasan Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP	45
Gambar 20. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2019 - 2024	50
Gambar 21. Bimbingan Teknis Integritas ASN dan Pelayanan Prima	51
Gambar 22. Perbandingan Capaian Nilai IKPA	58
Gambar 23. Detail Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per Unsur Tahun 2024	63
Gambar 24. Perbandingan Capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 - 2024 ..	64
Gambar 25. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Surveillance ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)	65

EXECUTIVE SUMMARY



PRODUKSI

20.918.449

NILAI PRODUKSI

150.455.968.550



**PERMOHONAN
PENGUSAHAAN**

63

6 (Baru)
57 (Perpanjangan)



TINGKAT KINERJA

97,42

(Sangat Baik)

**PENGEMBANGAN
FASILITAS**

74,66%

PM ZI WBK

91,84

TL LHP ITJEN

100%

**REKONSILIASI
KINERJA**

98,63

**NILAI
PENGENDALIAN
LINGKUNGAN**

96,39

(Sangat Baik)

IP ASN

92,04

**TINGKAT
KEPATUHAN
PBJ**

96,29%

**TINGKAT
KEPATUHAN
BMN**

90%

**PENERBITAN
SKKP**

486

Kapal

IKPA

98,65

NKPA

90

(Baik)

SKM

93,22

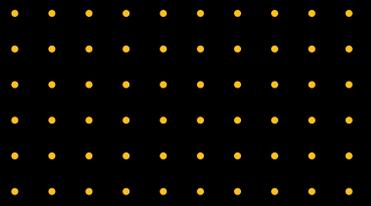
Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.824.634.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15.749.245.601,00 atau mencapai 99,52%. Secara kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,26% (Istimewa).

Hal ini didukung oleh pencapaian Sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, dimana pada tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) SK dan 18 (delapan belas) IK dengan capaian $\geq 100\%$. Adapun capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW IV	TW IV	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96	1.207,96	2.059,87	170,52
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046	20.046	20.918,45	104,35
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	97,42	115,97
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45	45	51,46	114,36
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70	70	74,66	106,66
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	96,39	320,23
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377	377	486	128,91
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5	24,5	33	134,69

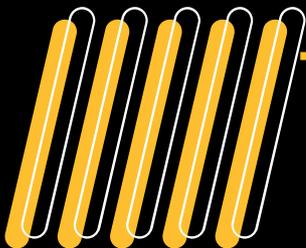
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW IV	TW IV	%
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80	80	91,84	114,80
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	100	125
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94	94	98,63	104,93
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84	84	92,04	109,57
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	96,29	120,36
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	90	112,5
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76	93,76	98,65	105,5
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71	71	90	126,76
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30	88,30	93,22	105,57

Untuk meningkatkan kinerja selanjutnya, seluruh tim kerja sebagai penanggung jawab IK dan Tim Pengelola Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi agar melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian periode berikutnya. Komitmen dan tanggungjawab pimpinan dan seluruh pegawai di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi diharapkan dapat mendukung kinerja yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja. Sistem Kinerja Instansi Pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk memperoleh informasi kinerja penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan perbaikan akuntabilitas kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pemenuhan kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 yang pertanggungjawabannya harus dilakukan secara akuntabel dan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran berbentuk laporan yang berisi penerapan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulanan dan tahunan). Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Pelabuhan Perikanan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan

Nusantara Prigi melaksanakan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan.
- Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan
- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
- Pengelolaan Sumber Daya Ikan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang disusun setiap Tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Tahun 2024 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

- Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Tahun 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Fungsi pemerintahan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, seerta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan. Fungsi pemerintahan Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

- Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- Pelayanan pembinaan dan pengendalian mutu pada kegiatan penangkapan ikan;
- Pengumpulan data tangkapan hasil perikanan;
- Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, yang meliputi pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan kegiatan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan keselamatan dan keamanan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan;
- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan, yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan keselamatan kerja;
- Pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan, hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;

- Pelaksanaan pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- Fasilitasi tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kesehatan;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi kepabeanaan dan/atau;
- Fasilitasi tempat pelaksanaan fungsi keimigrasian;
- Fungsi lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengusaha pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Fungsi pengusaha pelabuhan perikanan yaitu :

- Pelayanan bongkar muat;
- Pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- Pemasaran dan distribusi ikan;
- Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
- Pelayanan docking dan galangan kapal perikanan;
- Pelayanan logistik dan perbekalan awak kapal perikanan dan kapal perikanan;
- Penyelenggaran wisata bahari;
- Fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau
- Penyediaan dn/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 64/KEPMEN-KP/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108/KEPMEN-KP/2020 tentang Peta Jabatan dan lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

1.4. Aspek Strategis

Aspek Strategis Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dalam mendukung kebijakan pembangunan perikanan tangkap Tahun 2020 – 2024 sesuai dengan renstra DJPT adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan yang adil, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang kompeten, professional, dan berintegritas;
- Terkelolanya anggaran pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi secara efisien dan akuntabel.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, menyajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan gambaran singkat mengenai visi, misi, dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya) dalam Rencana Jangka Menengah (RPJM/Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan Penetapan Kinerja (PK) pada periode triwulan tertentu.

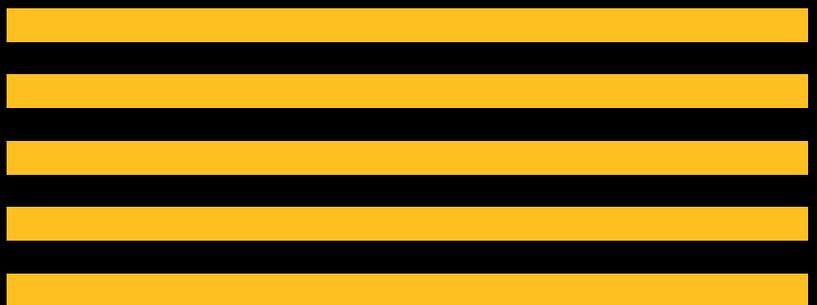
Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

Bab IV Penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan secara umum tentang capaian kinerja organisasi, tindak lanjut rekomendasi periode sebelumnya, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, pada bagian ini dilampirkan dokumen perjanjian kinerja, penghargaan yang diperoleh, serta dokumen kinerja lainnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun kedepan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut : **“Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan kedalam misi, strategi, dan upaya-upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan. Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ditetapkan sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- **Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan tangkap, termasuk memberdayakan nelayan;
- **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap**, yaitu : Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi Pelabuhan perikanan; Mengembangkan armada perikanan tangkap nasional yang kompetitif dan produktif; Mengakselerasi reformasi tata Kelola dan perizinan usaha perikanan tangkap;
- **Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap**, yaitu optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);
- **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup DJPT**, yaitu meningkatnya kinerja reformasi birokrasi DJPT secara berkualitas.

Dalam mendukung peran strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan visi dan misi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2020 – 2024. Adapaun visi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Pelabuhan Perikanan melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan uraian sebagai berikut :

- **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia**, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
- **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya**, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi tersebut, maka tujuan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi adalah :

- Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap, yaitu penumbuhan kewirausahaan dan fasilitasi akses pendanaan/ permodalan bagi nelayan, penguatan ketahanan pangan, pengentasa kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;

- Membangun struktur ekonomi perikanan tangkap yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, yaitu pembangunan struktur ekonomi pada sub bidang perikanan tangkap, melalui fasilitasi pengelolaan SDI berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan;
- Mencapai lingkungan hidup sumber daya perikanan yang berkelanjutan pada bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan, menyediakan sistem data dan informasi pengelolaan perikanan tangkap yang akurat dan terkini serta mendukung implementasi konsep eco-infrastucture;
- Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya di lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4,0.

2.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Kegiatan PPN Prigi

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha perikanan tangkap secara berdaulat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menerapkan strategi dengan menetapkan Sasaran Kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan selama lima tahun sebagai suatu *outcome/impact* dari program kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi merupakan bagian dari Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam operasional organisasi, dengan pengukuran dan penilaian kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Sasaran Kegiatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan 1 “**Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi**”, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkat” dengan Indikator Kinerja : Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 2 “**Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Meningkat**”, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat”, dengan Indikator Kinerja : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;

- Sasaran Kegiatan 3 **“Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Ekonomi Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan dan Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan”, dengan Indikator Kinerja : Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 4 **“Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan” dengan Indikator Kinerja : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dan Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Sasaran Kegiatan 5 **“Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab” dengan Indikator Kinerja : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan;
- Sasaran Kegiatan 6 **“Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan” dengan Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan;
- Sasaran Kegiatan 7 **“Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”**, untuk mendukung Sasaran Program Level 1 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap” dengan Indikator Kinerja : Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

2.3. Indikator Kinerja PPN Prigi

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Tujuan umum Perjanjian Kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (reward and punishment). Penetapan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

2.4. Target Kinerja PPN Prigi

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian pencapaian tujuan / sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap triwulan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84

Lanjutan Tabel 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	5 Nelayan/ awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan (Orang)	45
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6 Persentase pengendalian fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,01
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	377
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang terfasilitasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30		

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran dengan dilengkapi indikator kinerja yang akan dicapai. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kegiatan kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

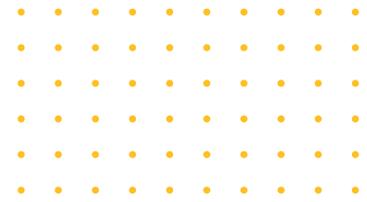


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi unit kerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi harus dapat dipertanggungjawabkan pencapaiannya, baik itu berupa keberhasilan maupun kegagalan. Hal tersebut sebagai bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bertanggung jawab dimana instansi pemerintah dan aparaturnya harus dapat mempertahankan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan pembangunan perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi menitikberatkan pada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 2. Dashboard Kinerja Tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,26% dan sampai dengan Triwulan III sebesar 114,16%. Capaian ini merupakan gambaran nilai kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada tahun 2024, seluruh indikator kinerja atau sebanyak 18 (delapan belas) indikator kinerja tercapai ($\geq 100\%$). Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja PPN Prigi Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Capaian	
			2024	TW IV	TW IV	%
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp Juta)	1.207,96	1.207,96	2.059,87	170,52
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046	20.046	20.918,45	104,35
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84	84	97,42	115,97
		5 Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45	45	51,46	114,36
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang optimal	6 Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70	70	74,66	106,66
		7 Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10	30,10	96,39	320,23
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8 Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	377	377	486	128,91
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9 Persentase peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan (Persen)	24,5	24,5	33	134,69
7	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan	10 Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80	80	91,84	114,80
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	100	125
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94	94	98,63	104,93
		13 Indeks profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84	84	92,04	109,57
		14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	96,29	120,36
		15 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80	80	90	112,5
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76	93,76	98,65	105,21
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71	71	90	126,76
18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30	88,30	93,22	105,57		

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pada periode tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan (SK) 1 - Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 1 yaitu Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi/badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan/pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara di sektor kelautan dan perikanan. PNBP PPN Prigi terdiri atas penerimaan umum dan fungsional.

Penghitungan nilai PNBP sektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 3. Capaian IK “Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi” Tahun 2024

SK 1		Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 1		Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
Realisasi Tahun 2019- 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target TW IV 2024	Realisasi TW IV 2024	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
575,66	644,23	973,35	1.646,04	1.945,04	1.207,96	2.059,87	170,52%	508	405,49%

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” sebesar Rp 2.059,87 juta atau sebesar 170,52% dari target tahun 2024. Penerimaan PNBP Non SDA terdiri dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum. PNBP fungsional terdiri atas pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai TUSI dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan. Sedangkan, PNBP umum terdiri atas pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, pendapatan pengembalian belanja pegawai, pendapatan penerimaan kembali belanja barang, serta pendapatan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya, penerimaan PNBP per jenis jasa dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Tahun 2024

ANGGARAN	JENIS JASA	TARGET 2024 (Rp)	REALISASI 2024 (Rp)
PNBP FUNGSIONAL		1.207.961.000	1.844.484.570
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai TUSI	562.060.000	868.582.869
	Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan	152.121.000	155.044.825
	Pelayanan Penggunaan Peralatan dan Mesin	409.939.000	710.113.044
	Pelayanan Penggunaan Transportasi	25.200.000	3.925.000
425621	Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	645.901.000	1975.901.701
	Pelayanan Tambat untuk Kapal Perikanan	243.462.000	169.831.740
	Pelayanan Labuh untuk Kapal Perikanan	-	102.884.035
	Pelayanan Jasa Pengadaan Air/PDAM	62.958.000	107.880.092
	Pelayanan Bengkel	8.640.000	-
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Harian Sekali Masuk	144.154.000	348.568.000
	Pelayanan Jasa Pas Masuk Berlangganan	36.270.000	66.990.000
	Pelayanan Jasa Kebersihan Pelabuhan	109.220.000	109.882.500
	Pelayanan Pelabuhan (Batang Tubuh) (Pemakaian Listrik)	41.197.000	69.865.334
PNBP UMUM		-	215.385.632
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	40.113.842
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.181.120
425911	Pendapatan Pengembalian Belanja Pegawai	-	2.752.100
425912	Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang	-	-
JUMLAH PNBP FUNGSIONAL DAN UMUM		1.207.961.000	2.059.870.202

Persentase realisasi PNBP Non SDA per Jenis Jasa di PPN Prigi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA per Jenis Jasa di PPN Prigi Tahun 2024

Realisasi PNBP Non SDA terbesar pada pelayanan penggunaan peralatan dan mesin (*freezer dan cold storage*) sebesar Rp 409.939 juta (32,1% dari total PNBP tahun 2024). Tingginya PNBP Non SDA pada pelayanan penggunaan *freezer dan cold storage* didukung oleh adanya pembekuan produk samping ikan patin (*belly, kulit, dan kepala*) secara kontinu / tidak bergantung pada musim. Selain itu, pelayanan petugas operator ruang pendingin yang melaksanakan pelayanan setiap saat menyesuaikan dengan permintaan pengguna jasa.



Gambar 4. Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA per Bulan di PPN Prigi Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa penerimaan PNBP tertinggi pada bulan Agustus 2024. Hal ini didukung oleh penerimaan pada beberapa pelayanan dengan penerimaan tertinggi pada bulan Agustus yaitu pelayanan penggunaan peralatan dan mesin, jasa pas masuk harian sekali masuk, tambat dan labuh untuk kapal perikanan.



Gambar 5. Perbandingan Capaian PNBP PPN Prigi Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan data capaian PNBP 5 (lima) tahun terakhir, penerimaan PNBP tahun 2024 merupakan penerimaan tertinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 - 2021, peningkatan penerimaan PNBP tahun 2024 berkisar antara 111,63% - 257,83%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, dimana penerapan tarif PNBP menggunakan peraturan yang sama (PP 85 Tahun 2021), penerimaan PNBP tahun 2024 meningkat sebesar Rp 114,83-413,83 juta atau 5,90% - 25,14%.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Rp 508 juta), capaian PNBP tahun 2024 sebesar 405,49%. Sedangkan perbandingan dengan capaian penerimaan PNBP pada satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PNBP PPN Prigi sebesar 80,68%, dimana capaian PNBP PPN Palabuhanratu sebesar 1.661,97 juta

Faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh komitmen para petugas pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Selain itu, tercapainya penerimaan PNBP didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Peningkatan PNBP pada pelayanan penggunaan peralatan dan mesin sebesar Rp 195,83 juta (38,08%) dan pelayanan jasa pas masuk harian sekali masuk dan pas masuk berlangganan sebesar Rp 27,31 juta (7,03%).
- Adanya penambahan pengajuan kontrak penggunaan tanah di lahan industri PPN Prigi
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP

Sedangkan faktor penghambat pencapaian IK Penerimaan PNBP PPN Prigi antara lain :

- Penurunan pendapatan jasa tambat labuh dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan;
- Adanya perubahan/ transisi pada pelayanan jasa penggunaan tanah bangunan dari mekanisme penggunaan menjadi pemanfaatan;
- Penurunan pendapatan pada pelayanan penggunaan transportasi (kendaraan berefrigerasi/ berpendingin) dikarenakan pengguna jasa memiliki armada sendiri. Selain itu kendaraan berpendingin menggunakan bahan bakar dexlite yang tarifnya lebih mahal dibandingkan jenis BBM lainnya.

Upaya yang akan dilaksanakan di periode berikutnya untuk meningkatkan capaian PNBP Non SDA antara lain rekonsiliasi dengan kesyahbandaran terkait pelayanan jasa tambat labuh, percepatan proses pengajuan transisi pemanfaatan tanah dan bangunan, evaluasi koordinasi dengan pelaku usaha terkait pelayanan *insulated truck*, serta sosialisasi pemanfaatan tanah dan bangunan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Penerimaan PNBP Non-SDA	170,52%	185.092.000	184.375.000	315.627.552	131.252.552
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				70,91%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{133,96\%}{20} \times 50)$				227,28%	

Pencapaian IK 1 didukung oleh anggaran sebesar Rp 185.092.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 184.375.000,00 atau 99,61% dengan efisiensi 70,91% dan nilai efisiensi 227,28%.

Dalam pencapaian IK 1, didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM dengan 8 (delapan) pelayanan. Adanya Sistem Jasa Kepelabuhanan (SIJAKA) yang terintegrasi dengan aplikasi teman SPB dan Simponi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran tambat labuh serta meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan SDM.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain desiminasi pelayanan usaha sesuai ketentuan, monitoring dan evaluasi penggunaan tanah bangunan, rekonsiliasi data, dan kegiatan lainnya.



Gambar 6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tanah Bangunan serta Koordinasi dan Rekonsiliasi terkait Tambat Labuh

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 1 yaitu program pengelolaan pelabuhan perikanan - pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan.

Sasaran Kegiatan (SK) 2 - Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 2 yaitu Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 2 - Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi

Volume produksi perikanan tangkap merupakan jumlah produksi perikanan tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Pengumpulan data produksi dilakukan oleh petugas Enumerator. Pendataan dilaksanakan dengan pencacahan lengkap menggunakan form monitoring data produksi harian. Data yang telah terkumpul kemudian diolah, diverifikasi, divalidasi serta dilaporkan secara berkala.

Tabel 6. Capaian IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” Tahun 2024

SK 2		Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 2		Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
28.822,88	24.928,23	21.392,42	13.322,16	26.525,13	20.046	20.918,45	104,35%	23.638	88,50%	

Capaian Indikator Kinerja “Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi” (IK 2) yaitu sebesar 20.918,45 Ton atau 104,35% dari target tahun 2024. Volume produksi per bulan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi Tahun 2024

Volume produksi terendah terjadi pada bulan Maret yaitu 245,17 ton. Sedangkan volume produksi tertinggi terjadi pada bulan September yaitu 4.251,51 ton. Hal ini sebanding dengan data frekuensi kunjungan kapal. Pada tahun 2024, rata-rata volume produksi mengalami penurunan. Penurunan rata-rata volume produksi disebabkan kondisi musim dan cuaca yang tidak mendukung aktivitas penangkapan ikan (curah hujan tinggi, gelombang dan kecepatan angin tinggi) serta kondisi ekosistem laut (perubahan suhu permukaan laut, dll). Selain itu, pada tahun 2024, penurunan volume produksi juga dipengaruhi oleh fenomena alam global (dampak el Nino pada perairan Selatan Jawa). Kondisi cuaca yang tidak mendukung aktivitas penangkapan secara langsung berakibat terhadap penurunan frekuensi kunjungan kapal dan volume produksi perikanan tangkap.



Gambar 8. Perbandingan Volume Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2019 - 2024

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, volume produksi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 473,97 - 7.963,55 Ton atau 2,22 - 27,57%. Sedangkan jika dibandingkan dengan volume produksi tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 7.596,29 Ton atau 57,02%. Peningkatan dan penurunan produksi yang terjadi berbanding lurus dengan jumlah frekuensi kunjungan kapal. Pada tahun 2024, terjadi penurunan frekuensi kunjungan kapal pada alat tangkap dominan (Pukat Cincin 2 Kapal) sebesar 3.913 kali (29,08%). Pada beberapa alat tangkap terjadi peningkatan frekuensi yaitu alat tangkap payang sebanyak 494 kali (77,19%) dan pancing ulur sebanyak 2.418 kali (218,23%). Akan tetapi, kedua alat tangkap tersebut memiliki tingkat produktivitas kecil dengan rata-rata volume per trip sebesar 2.200,31 kg (payang) 139,55 kg (pancing ulur).

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (23.638 ton), capaian volume produksi perikanan tangkap tahun 2023 mencapai 88,50%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian PPN Palabuhanratu (12.278 ton), capaian PPN Prigi sebesar 170,37%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

- Peningkatan *sucessed trip* sebesar 7%. Pada tahun 2023, persentase *sucessed trip* sebesar 67,38%. Sedangkan pada tahun 2024 sebesar 74,39%. Hal ini didukung oleh penggunaan alat bantu penangkapan ikan (*fish finder*) pada sebagian kapal;
- Peningkatan frekuensi kunjungan kapal sebesar 77,19% pada alat tangkap payang dan 218,23% pada alat tangkap pancing ulur;
- Peningkatan volume produksi sebesar 314,5% pada alat tangkap payang dan 664,79% pada alat tangkap pancing ulur.

Faktor penghambat tercapainya indikator kinerja ini antara lain :

- Kondisi cuaca tidak mendukung untuk melaksanakan kegiatan penangkapan (curah hujan tinggi, kecepatan angin dan gelombang tinggi);
- Penurunan frekuensi kunjungan kapal pada alat tangkap dominan (29,08%);
- Penurunan volume produksi pada alat tangkap dominan (32,25%)

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait sistem pendataan produksi perikanan tangkap serta validasi data hasil tangkapan ikan di PPN Prigi. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain validasi data internal terkait kesesuaian hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan, serta pengolahan dan validasi data statistik nasional.



Gambar 9. Kegiatan Pembongkaran Ikan dan Enumerasi Perikanan Tangkap di PPN Prigi

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Volume Produksi Perikanan Tangkap	104,35%	10.000.000	9.938.500	10.435.224	496.724
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				4,97%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{104,06\%}{20} \times 50 \right)$				0,51%	

Pencapaian IK 2 didukung oleh anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 9.938.500,00 atau 99,39% dengan efisiensi 4,97% dan nilai efisiensi 0,51%.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program layanan data dan informasi dengan kegiatan penyelenggaraan, pengolahan, dan validasi data statistik lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Sasaran Kegiatan (SK) 3 - Pengelolaan PPN Prigi yang Berdaya Saing

Indikator Kinerja (IK) pada SK 3 yaitu Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; serta Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 3 - Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/ atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi dihitung berdasarkan dua indikator. Indikator pertama yaitu hasil analisa kesesuaian permohonan perusahaan terhadap usulan perusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (bobot 80%). Indikator kedua yaitu ruang lingkup pelayanan perusahaan yang terstandardisasi (SOP/ISO/standar pelaksanaan lainnya) (bobot 20%).

Tabel 8. Capaian IK “Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi” Tahun 2024

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing									
IK 3 Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (%)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	100	100	100%	100	100%

Pada tahun 2024, total jumlah usulan perusahaan yang masuk sebanyak 63 (enam puluh tiga) usulan, dengan 6 (enam) permohonan baru dan 57 (lima puluh tujuh) permohonan perpanjangan. Seluruh usulan perusahaan yang masuk telah dievaluasi / dianalisa.

Tabel 9. Penghitungan Capaian IK “Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di PPN Prigi” Tahun 2024

Indikator Penilaian	Data Dukung		Bobot (%)	% Capaian
Indikator I	Usulan Perusahaan	Analisa Usulan Perusahaan	80 %	80 %
	63	63		
Indikator II	02-SOP-TKPU/PPN.PRG/XI/2023 tanggal 7 November 2023 (SOP Pengelolaan PPNBP Pelayanan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan)		20%	20 %
Persentase Permohonan Perusahaan				100 %

Tabel 10. Perbandingan Jumlah Usulan Permohonan Pengusahaan di PPN Prigi Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Permohonan Pengusahaan	2023		2024	
		Usulan Pengusahaan Masuk	Analisa Usulan Pengusahaan	Usulan Pengusahaan Masuk	Analisa Usulan Pengusahaan
1	Permohonan Baru	26	26	6	6
2	Permohonan Perpanjangan	6	6	57	57
3	Addendum	1	1	-	-
	Jumlah	33	33	63	63

Pada tahun 2024, permohonan pengusahaan yang masuk didominasi oleh pemohonan perpanjangan. Dibandingkan dengan tahun 2023, jumlah permohonan yang masuk lebih banyak (peningkatan sebanyak 90,91%). Peningkatan jumlah permohonan pengusahaan ini disebabkan oleh sebagian besar masa berlaku perjanjian kontrak habis pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target Renstra, capaian persentase permohonan pengusahaan yang dievaluasi / dianalisa sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), dari persentase mempunyai capaian yang sama yaitu 100%. Akan tetapi, jika dibandingkan dari jumlah usulan pengusahaan yang dianalisa, jumlah usulan pengusahaan yang masuk sebesar 31,5%, dimana usulan pengusahaan yang masuk ke PPN Palabuhanratu sebanyak 200 usulan. Capaian PPN Palabuhanratu didukung oleh adanya pasar ikan segar yang terdiri dari lebih dari 50% dari total usulan permohonan pengusahaan yang masuk.

Faktor pendukung pencapaian target persentase permohonan yang dianalisa/dievaluasi yaitu terpenuhinya kelengkapan dan kesesuaian berkas yang disampaikan oleh pemohon serta ketersediaan tanah industri yang belum dimanfaatkan.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu banyaknya pemenuhan berkas permohonan yang perlu diserahkan oleh calon pengguna, sehingga memerlukan proses dan waktu yang lebih lama untuk bisa dianalisa/dievaluasi (usulan pengusahaan baru) dan kepatuhan terhadap kontrak perjanjian kerja sebelumnya (usulan pengusahaan perpanjangan). Selain itu, adanya transisi dari penggunaan tanah bangunan menjadi pemanfaatan tanah bangunan juga menjadi kendala dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Upaya yang akan dilaksanakan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pengguna jasa (pengguna tanah/bangunan) serta sosialisasi pemanfaatan tanah dan bangunan.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain pemaparan dan pembahasan calon pengguna tanah di kawasan PPN Prigi; Monitoring dan evaluasi pemanfaatan penggunaan lahan; Monitoring dan evaluasi penggunaan tanah dan bangunan di kawasan PPN Prigi; Penandatanganan kontrak penggunaan bangunan di PPN Prigi; Fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha.



Gambar 10. Kegiatan Pemaparan dan Pembahasan Proposal Permohonan Penggunaan Bangunan, Penandatanganan Kontrak, dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan / Hambatan Pelaku Usaha

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 10. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Permohonan Pengusahaan yg Dianalisa	100%	83.440.000	83.016.011	83.440.000	423.989
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				0,51%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{0,77\%}{20} \times 50\right)$				51,27%	

Pencapaian IK 3 didukung oleh anggaran sebesar Rp 83.440.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 83.016.011,00 atau 99,49% dengan efisiensi 0,51% dan nilai efisiensi 51,27%. Dalam pencapaian IK 3, didukung oleh 3 (tiga) orang SDM yang terdiri dari 1 (satu) orang P3T dan 2 (dua) orang Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana. Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengusahaan (penggunaan tanah dan bangunan), menggunakan aplikasi SIPAUS (Aplikasi pengusahaan) yang berfungsi sebagai digitalisasi arsip terkait penggunaan tanah bangunan, sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data penggunaan tanah dan bangunan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian IK 2 yaitu program pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan dengan kegiatan pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan, pelayanan perusahaan pelabuhan perikanan, serta program fasilitasi dan pembinaan masyarakat melalui kegiatan fasilitasi akses pendanaan usaha bagi nelayan.

Indikator Kinerja (IK) 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kinerja pelabuhan perikanan merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan sesuai SK Ditjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan.

Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) Administrasi dan sistem informasi; 2) Fasilitas pelabuhan perikanan; 3) Pelayanan umum; serta 4) Investasi dan industri.

Tabel 11. Capaian IK “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 3		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing								
IK 4		Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)								
Realisasi Tahun 2019 - 2022					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
-	80,58	87,75	92,42	92,81	84	97,42	115,97%	84	115,97%	

Capaian tingkat kinerja pelabuhan perikanan pada tahun 2024 yaitu 97,42 atau 111,82% dari target tahun 2024. Capaian nilai tingkat kinerja tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian IK “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” per Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Nilai Tingkat Kinerja	Kategori	Keterangan
1	Januari	94,00	Sangat Baik	Belum memasuki puncak musim penangkapan
2	Februari	93,75	Sangat Baik	Belum memasuki puncak musim penangkapan
3	Maret	93,75	Sangat Baik	Belum memasuki puncak musim penangkapan
4	April	93,75	Sangat Baik	Belum memasuki puncak musim penangkapan
5	Mei	95,00	Sangat Baik	Mulai memasuki puncak musim penangkapan
6	Juni	94,00	Sangat Baik	Penurunan frekuensi pengiriman data (PIPP)
7	Juli	95,00	Sangat Baik	Mulai memasuki puncak musim penangkapan
8	Agustus	96,25	Sangat Baik	Peningkatan nilai penyerapan tenaga kerja
9	September	97,50	Sangat Baik	Puncak musim penangkapan
10	Oktober	98,25	Sangat Baik	Puncak musim penangkapan
11	November	97,00	Sangat Baik	Penurunan produksi, nilai perbekalan maksimal
12	Desember	97,00	Sangat Baik	Penurunan produksi, nilai investor maksimal

Capaian nilai tingkat kinerja PPN Prigi sepanjang tahun 2024 berkisar antara 93,75 - 98,25 dengan kategori Sangat Baik. Hal ini sangat berkaitan dengan musim penangkapan yang secara langsung akan mempengaruhi nilai frekuensi kunjungan kapal, kapasitas daya tampung kolam, pelayanan tambat labuh, dan produksi perikanan. Nilai kinerja tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Selain dipengaruhi oleh musim puncak ikan, pada bulan Oktober nilai perbekalan kapal (air, BBM, dan es) memperoleh nilai maksimal. Sedangkan, nilai tingkat kinerja terendah terjadi pada triwulan I dan awal triwulan II. Pada kurun waktu tersebut, belum memasuki musim tangkap ikan sangat berpengaruh terhadap penurunan frekuensi kunjungan kapal. Selain itu, rata-rata produksi perikanan hanya berkisar antara 7,59 - 26,72 ton.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (tahun 2020 -2022), capaian tingkat kinerja PPN Prigi tahun 2024 merupakan nilai tertinggi. Secara umum, peningkatan ini disebabkan oleh adanya upaya monitoring dan evaluasi secara berkala serta adanya tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Peningkatan nilai terjadi pada beberapa kriteria antara lain penyaluran air bersih, es, dan BBM, serta perubahan jumlah investor di pelabuhan perikanan.



Gambar 11. Perbandingan Nilai Tingkat Kinerja Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (84), capaian IK 4 sebesar 115,97%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain - PPN Palabuhanratu (87,83), capaian PPN Prigi 110,92%. Hal ini sangat berkaitan erat dengan volume produksi, dimana pada kriteria 15 - produksi perikanan, dapat memperoleh nilai maksimal apabila volume produksi lebih dari 30 ton/hari.

Faktor pendukung pencapaian target tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap kelompok kerja yang melakukan tugasnya serta melaporkan dan menginput pelaksanaan kegiatan pada sistem PIPP;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi dan supervisi secara berkala terhadap input data yang telah dilakukan;
- Adanya tindak lanjut monitoring evaluasi dan supervisi pelaksanaan input data PIPP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target ini yaitu : Tingkat ketelitian operator dalam penginputan data perlu ditingkatkan (*human error*); Nilai tingkat kinerja bersifat fluktuatif yang sangat dipengaruhi oleh 27 (dua puluh tujuh) parameter penilaian; Jaringan internet kurang stabil; Penginputan data PIPP hanya dapat dilakukan melalui PIPP mobile membutuhkan sarana serta waktu yang lebih lama. Selain itu, terdapat menu verifikasi yang sangat mempengaruhi pada capaian kriteria produksi, frekuensi kunjungan kapal, daya tampung kolam, dan penyerapan tenaga kerja.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu Melaksanakan koordinasi antar anggota tim / penanggungjawab per kriteria penilaian; Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan input data PIPP dan capaian tingkat kinerja bulanan secara berjenjang.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain pelaksanaan operasional PIPP di pelabuhan perikanan, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi serta validasi terhadap pelaksanaan input data. Selain itu, PPN Prigi juga melakukan kegiatan pembinaan dan supervisi penerapan sistem informasi dan penguatan keterpaduan pelabuhan perikanan di pelabuhan perikanan UPT daerah yang menjadi pelabuhan binaan PPN Prigi. Adapun tujuan kegiatan tersebut yaitu meningkatkan penerapan sistem informasi dan keterpaduan pelabuhan perikanan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator PIPP dalam pelaksanaan input data PIPP sehingga dapat meningkatkan tingkat kinerja pelabuhan perikanan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 13. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kinerja Pelabuhan	111,82%	142.929.000	137.517.074	159.822.175	22.305.101
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				15,61%	
$= \frac{\sum (0)}{\sum (x)} \times 100\%$					
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{R_{RO}}{20} \times 50 \right)$				89,01%	
$= 50\% + \left(\frac{12,61\%}{20} \times 50 \right)$					

Pencapaian IK 4 didukung oleh anggaran sebesar Rp 142.929.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp 137.517.074,00 atau 96,21% dengan nilai efisiensi 15,61% dan nilai efisiensi 89,01%. Dalam pencapaian IK 4, didukung oleh 14 (empat belas) orang SDM yang terdiri dari masing-masing kelompok kerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelabuhan yaitu : Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di Pelabuhan Perikanan dan PP Binaan; Bimbingan teknis operator PIPP, dll.

Indikator Kinerja (IK) 5 - Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran

Tingkat pelayanan kesyahbandaran merupakan indikator yang menunjukkan pelayanan kesyahbandaran yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Jumlah Persetujuan Berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
2. Jumlah Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
3. Jumlah Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)

Tabel 14. Capaian IK “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 3 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing									
IK 5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	41,47	45	51,46	114,36%	40	128,65%

Capaian tingkat pelayanan kesyahbandaran per indikator penilaian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 15. Capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran per Indikator Tahun 2024

INDIKATOR	FORMULA PENGHITUNGAN	HASIL PENGHITUNGAN
X1 Jumlah Persetujuan Berlayar yang Diterbitkan	$\frac{\text{jumlah kapal yang diterbitkan persetujuan berlayar}}{\text{jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}} \times 100 \times 40\%$	$\frac{13}{572} \times 100 \times 40\% = 0,91\%$
X2 Jumlah STBLK yang Diterbitkan	$\frac{\text{jumlah kapal yang diterbitkan STBLK}}{\text{jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan}} \times 100 \times 40\%$	$\frac{437}{572} \times 100 \times 40\% = 30,56\%$
X3 Jumlah SHTI yang Diterbitkan	$100 - \frac{\text{jumlah permohonan sertifikasi SHTI}}{\text{jumlah SHTI yang diterbitkan}} \times 100 \times 20\%$	$100 - \frac{2}{3.115} \times 100 \times 20\% = 19,99\%$
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran : X1 + X2 + X3		51,46%

Capaian IK tingkat pelayanan kesyahbandaran tahun 2024 sebesar 51,46% yang terdiri dari jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan 0,91% jumlah STBLK yang diterbitkan 30,56% dan jumlah SHTI yang diterbitkan 19,99%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 meningkat sebesar 9,99% dengan persentase peningkatan sebesar 20,09%. Dibandingkan dengan tahun 2023, nilai tingkat kesyahbandaran mengalami kenaikan. Terjadi peningkatan nilai pelayanan STBLK, untuk nilai pelayanan SPB mengalami sedikit penurunan sedangkan nilai pelayanan SHTI tetap. Kenaikan tersebut selain karena meningkatnya kesadaran nelayan untuk melaporkan kedatangan, sehingga nilai tingkat pelayanan STBLK meningkat. Selain itu juga dilaksanakan pendataan ulang kapal yang berpangkalan di PPN Prigi, dimana terjadi penurunan jumlah kapal.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra kedua 2023), dimana target akhir tahun Renstra 40 % , capaian Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran sebesar 128,65 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 109,77%, dimana capaian IK 5 PPN Palabuhanratu 46,88%. Pada pelayanan penerbitan SPB, PPN Palabuhanratu memiliki nilai lebih tinggi (13,52%). Akan tetapi, pada pelayanan penerbitan STBLK, nilai PPN Palabuhanratu lebih rendah (13,36%).

Faktor pendukung pencapaian target IK 5 yaitu :

- Meningkatnya presentase kapal yang berijin di PPN Prigi sebagai output dari kegiatan gerai dokumen kapal bekerjasama dengan KSOP Probolinggo dan gerai perizinan bekerjasama dengan DKP Provinsi Jawa Timur;
- Meningkatnya kesadaran nelayan dalam pelaporan kedatangan dan keberangkatan;
- Penerbitan SHTI dengan jumlah dokumen yang cukup banyak

Faktor penghambat pencapaian target IK 5 yaitu :

- Verifikasi penerbitan SHTI dari negara tujuan ekspor;
- Jumlah kapal dengan dokumen dan perizinan lengkap masih 30%;
- Penerbitan SPB masih terkendala dengan dokumen perijinan dan dokumen pengawakan yang belum lengkap

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya antara lain : Sosialisasi kepada UPI terkait prosedur penerbitan SHTI untuk mengurangi verifikasi dari Uni Eropa; Bekerjasama dengan instansi terkait percepatan penerbitan dokumen kapal dan perizinan.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain : Desiminasi regulasi kesyahbandaran; Sosialisasi Peraturan Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan dan Gerai Buku Pelaut Perikanan; Pembinaan izin usaha perikanan tangkap bekerjasama dengan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar; Pembinaan izin usaha perikanan tangkap; Pembinaan dan gerai pelayanan izin usaha perikanan tangkap; Evaluasi Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); Pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan; dan Desiminasi pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan.



Gambar 9. Kegiatan Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap, Sosialisasi Peraturan Tata Kelola Pengawakan Kapal dan Gerai Buku Pelaut

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 16. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran	114,36%	408.083.000	391.036.918	466.665.582	75.628.664
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				18,53%	
= $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$				96,33%	
= $50\% + (\frac{39,20\%}{20} \times 50)$					

Pencapaian IK 5 didukung oleh anggaran sebesar Rp 408.083.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 391.036.918,00 atau 95,82% dengan efisiensi 18,53% dan nilai efisiensi 96,33%. Dalam pencapaian IK 5, didukung oleh 12 (dua belas) orang SDM, yang terdiri dari 1 (satu) orang Syahbandar, 8 (delapan) orang petugas penerbitan SPB dan STBL, serta 3 (tiga) orang petugas penerbitan SHTI. Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI, PPN Prigi memiliki inovasi “KIRIM SHTI” untuk peningkatan efektifitas waktu, biaya, dan tenaga dalam pengajuan SHTI, dimana pengguna jasa tidak perlu datang ke PPN Prigi. Permohonan penerbitan SHTI dikirimkan melalui *email* dan produk SHTI dikirim melalui jasa pengiriman dengan biaya pengiriman dibayar pemohon (*Cash in Delivery / COD*).

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : Program pengelolaan pelabuhan perikanan, melalui kegiatan pelaksanaan tata kelola dan operasional kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, desiminasi regulasi kesyahbandaran dan aplikasi teman SPB di Pelabuhan Perikanan, pengelolaan dan operasional SHTI, evaluasi SHTI, pengumpulan dan verifikasi SHTI, desiminasi pengumpulan dan verifikasi data logbook penangkapan ikan, dll.

Sasaran Kegiatan (SK) 4 - Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal

Indikator Kinerja (IK) pada SK 4 yaitu Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; serta Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Indikator Kinerja (IK) 6 - Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator kinerja “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Prigi” dihitung berdasarkan persentase pengembangan fasilitas eksisting (ha) dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha).

Tabel 17. Capaian IK “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 4 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal									
IK 5 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	74,58	70	74,66	106,66%	70	106,66%

Capaian IK 6 tahun 2024 sebesar 74,66% atau 106,66% dari target tahun 2024. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari pengembangan fasilitas dibandingkan dengan luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2003. Secara umum, pengembangan dan peningkatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi, berdasarkan *masterplan*, kebutuhan luasan tanah Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi seluas 21,5 ha, sedangkan tanah dalam penguasaan / kawasan seluas 14,58 ha (67,81%). Selain itu, beberapa fasilitas yang belum dimiliki antara lain zona kapal besar (fasilitas pokok); instalasi telekomunikasi (SSB), telepon; pabrik es; serta *slipway / docking* (fasilitas fungsional).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas meningkat. Peningkatan ini didukung oleh adanya penambahan pemanfaatan tanah seluas 0,217 ha pada kawasan industri.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (Reviu Renstra ketiga 2023), dimana target akhir yaitu 70%, capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas di PPN Prigi tahun 2024 sebesar 106,66%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 92,86%, dimana capaian IK 6 PPN Palabuhanratu 80,40%.

Faktor pendukung pencapaian target IK 6 yaitu adanya peningkatan penggunaan tanah industri. Sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja ini yaitu 1) Kurangnya ketersediaan lahan industri untuk usaha perikanan yang sesuai dengan *masterplan*; 2). Keterbatasan anggaran; 3) Kebutuhan untuk kapal 30 GT belum lengkap; 4) Rencana pengembangan kolam 3 belum mendapat persetujuan dan anggaran dari pusat.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan antara lain : 1) Mengajukan usulan pengembangan pelabuhan; 2) Reviu *masterplan*. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu peningkatan fasilitas kantor pelayanan terpadu, peningkatan gudang keranjang dan pagar kawasan, serta pembangunan lampu navigasi / suar. Upaya yang dilaksanakan yaitu identifikasi kebutuhan sarana prasarana yang mendukung operasional pelabuhan perikanan serta koordinasi dengan konsultan perencanaan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 18. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas	106,66%	600.748.000	599.403.816	640.740.653	41.336.837
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				6,88%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{24,32\%}{20} \times 50)$				67,20%	

Pencapaian IK 6 didukung oleh anggaran sebesar Rp 600.748.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 599.403.816,00 atau 99,78% dengan nilai efisiensi 6,88% dan nilai efisiensi 67,20%. Dalam pencapaian IK 6, didukung oleh 4 (empat) orang SDM, yang terdiri dari 3 (tiga orang) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana serta 1 (satu) orang AP3T.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas yaitu : Program prasarana bidang kemaritiman, kelautan, dan perikanan melalui kegiatan pelaksanaan pembangunan/ pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus 1) bertanggungjawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Penilaian pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN). SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diupdate berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore pelabuhan. Indikator hasil meliputi kebersihan pelabuhan, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Tabel 19. Capaian IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 4 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal									
IK 7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019- 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	91,27	30,10	96,39	320,23%	30,01	321,19

Capaian IK 7 tahun 2024 sebesar 96,39 atau 320,23% dari target tahun 2024. Capaian nilai pengendalian lingkungan PPN Prigi memiliki predikat “Sangat Baik“, hal ini disebabkan seluruh indikator program *mandatory* dan program *voluntary* tata kelola pengendalian lingkungan terpenuhi dan terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, kendala yang dihadapi pada periode triwulan sebelumnya telah ditindaklanjuti. Pada triwulan IV 2024, nilai pengendalian lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berada di urutan pertama (teratas) dari total dua puluh dua Pelabuhan Perikanan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian triwulan IV 2024 meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2023, pengendalian lingkungan belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya beberapa ketidaksesuaian pada beberapa indikator serta belum tercapainya nilai maksimal pada indikator lainnya. Sedangkan pada tahun 2024, peningkatan nilai terjadi pada setiap indikator, baik program wajib (*mandatory*), program sukarela (*voluntary*), maupun indikator hasil. Adanya tindak lanjut dari catatan hasil evaluasi periode sebelumnya juga mendukung peningkatan capaian pada tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra ketiga 2023), dimana target akhir tahun yaitu 30,01 capaian nilai pengendalian lingkungan sebesar 321,19%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 109,80%, dimana capaian IK 7 PPN Palabuhanratu 87,79.

Tercapainya nilai pengendalian lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya kontribusi dan komitmen dari setiap petugas yang melakukan tugasnya dan melaporkan serta mengumpulkan *evidence* pelaksanaan kegiatan di WAG Selaraskan PPN Prigi;
- Data dukung yang dibutuhkan dalam pelaporan setiap program *mandatory* dan *voluntary* di SELARASKAN sudah terpenuhi sesuai dengan periode pelaksanaan masing-masing program;
- Adanya monitoring dan evaluasi serta validasi secara berkala terhadap input data yang telah dilaksanakan.

Faktor penghambat/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian IK ini yaitu ketelitian dalam penilaian dari tim pusat, sehingga tim Selaraskan PPN Prigi harus lebih teliti lagi dalam menindaklanjuti catatan dalam lembar penilaian pada *evidence*/data dukung pelaksanaan kegiatan setiap program

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain : *Surveillance* ISO 14001:2015; Pelaksanaan kegiatan K5; Sosialisasi pemantauan dan pengendalian lingkungan; Gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan; Pelaksanaan uji kualitas air, udara, dan kebisingan; Melaksanakan monitoring dan evaluasi tim pengendalian lingkungan, dll.



Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi Pemantauan & Pengendalian Lingkungan, Penimbangan Sampah Laut, serta Uji Kualitas Udara, Air Laut, dan Air Limbah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 20. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Pengendalian Lingkungan	320,23%	242.975.000	240.969.801	778.085.058	537.115.257
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				221,06%	
= $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$				602,64%	
= $50\% + (\frac{204,53\%}{20} \times 50)$					

Pencapaian IK 7 didukung oleh anggaran sebesar Rp 242.975.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp 240.969.801,00 atau 99,17 % dengan efisiensi 221,06% dan nilai efisiensi 602,64%. Dalam pencapaian IK 7, didukung oleh 8 (delapan) orang SDM berdasarkan Surat Tugas Tim Pengelola Aplikasi Selaraskan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Nilai Pengendalian Lingkungan yaitu : Program pelabuhan perikanan - pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan melalui kegiatan K5 di pelabuhan perikanan, gerakan cinta laut dalam rangka mendukung pengendalian lingkungan, surveillance ISO 14001 : 2015.

Sasaran Kegiatan (SK) 5 - Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Peangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 5 yaitu Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.

Indikator Kinerja (IK) 8 - Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (Sertifikat Kelaikan Kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi.

Tabel 21. Capaian IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Tahun 2024

SK 5 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi									
IK 8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	148	337	377	486	128,91%	50	298%

Realisasi capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) kapal atau 128,91% dari target tahun 2024. Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian tahun 2023 (337 kapal) dan capaian tahun 2024 (149 kapal). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan mekanisme penerbitan SKKP (Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan) yang pada tahun 2023 mekanisme surat edaran dan reguler. Sedangkan pada tahun 2024 hanya menggunakan mekanisme reguler.

PPN Prigi melayani penerbitan SKKP di pelabuhan binaan (UPT PPP Tamperan, UPT PPP Popoh, IPPP Tambakrejo, UPT PPP Pondokdadap, UPT PPP Muncar, dan Pelabuhan Masami/ Tanjungwangi). Penerbitan SKKP di masing-masing pelabuhan dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Gambar 10. Penerbitan SKKP PPN Prigi per Pelabuhan Perikanan Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Restra kedua 2023), dimana terget akhir tahun yaitu 50 kapal, capaian kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan sebesar 298%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 267,03%, dimana capaian IK 8 PPN Palabuhanratu 182 (seratus delapan puluh dua) dokumen.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu :

- Telah dilaksanakan Penerbitan Sertifikat kelaikan Kapal Perikanan di PPN Prigi dan UPTD daerah yang merupakan binaan PPN Prigi;
- Syahbadar di beberapa UPTD binaan telah mengikuti diklat petugas kelaikan sehingga bisa pemeriksaan kelaikan menjadi lebih cepat.

Faktor penghambat / kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu kurangnya anggaran menyebabkan mobilisasi dalam rangka pemeriksaan kelaikan di UPTD binaan menjadi terbatas

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal, serta melaksanakan sosialisasi secara perorangan kelaikan kapal perikanan kepada pemilik kapal perikanan.



Gambar 11. Kegiatan Pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan dan Rapat Koordinasi Pelayanan SKKP

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM).

Tabel 22. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Kapal Perikanan Izin Daerah yg Memenuhi Ketentuan	128,91%	25.000.000	24.025.408	32.228.117	8.202.709
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				32,81%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{574,28\%}{20} \times 50)$				132,03%	

Pencapaian IK 8 didukung oleh anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 24.025.408,00 atau 96,10% dengan efisiensi 32,81% dan nilai efisiensi 132,03%. Dalam pencapaian IK 8, didukung oleh 9 (sembilan) orang SDM yang terdiri atas 7 (tujuh) orang petugas kelaikan kapal, 1 (satu) orang verifikator, dan Kepala Pelabuhan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran yaitu : yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan – pengelolaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan yang meliputi kegiatan Sosialisasi kelaikan kapal perikanan; Bimtek petugas kelaikan kapal perikanan; Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan/ pengukuran/ kapal perikanan.

Sasaran Kegiatan (SK) 6 - Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 6 yaitu Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 9 - Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan

Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi laik laut, laik tangkap, dan laik simpan, serta memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Formula penghitungan IK 9 yaitu persentase jumlah awak kapal / nelayan yang memiliki e-PKL / PKL dan sudah tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah awak kapal yang memiliki e-PKL / PKL.

Tabel 23. Capaian IK “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan” Tahun 2024

SK 6 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	5,74	24,50	33	134,69%	20	165%

Capaian IK 9 yaitu 33% dari target 24,5% atau 134,69% dari target yang ditentukan. Pada tahun 2024, PPN Prigi memfasilitasi penerbitan PKL terhadap 100 (seratus) orang nelayan, 33 (tiga puluh tiga) orang diantaranya sudah tersertifikasi. Peningkatan pengetahuan kompetensi dan perlindungan nelayan / awak kapal perikanan diberikan kepada awak kapal perikanan yang memiliki sertifikasi awak kapal, dan terdaftar pada jaminan sosial asuransi/BPJS Ketenagakerjaan. Awak kapal perikanan terlindung belum optimal dipengaruhi dari awak kapal perikanan belum memiliki KTP, NIK tidak terbaca, dan batas usia melewati 65 tahun.

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 18,76%. Dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra kedua 2023) dimana target akhir tahun 20%, capaian tahun 2024 sebesar 165%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 231,42%, dimana capaian PPN Palabuhanratu 14,26%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu diadakannya Bimtek Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN), sehingga semakin banyak nelayan yang tersertifikasi kompetensinya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu : Ketika dilaksanakan Bimtek SKN banyak ABK dan nakhoda yang melaut sehingga tidak bisa menghadiri acara tersebut;; Rendahnya kesadaran dan pengetahuan nelayan mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi; Masih banyak ABK yang belum terlindungi oleh BPJS ketenagakerjaan dan PKL.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja ini antara lain : 1) Menyelenggarakan Bimbingan teknis atau diklat kepelautan bagi awak kapal perikanan sesuai pada jabatan; 2) Koordinasi dan konsultasi pada instansi pemberi jaminan sosial Asuransi dan BPJS Ketenaga kerjaan.

Upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu fasilitasi Perjanjian Kerja Laut dan pelaksanaan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan / nelayan melalui Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN).



Gambar 16. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Kecakapan Nelayan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 20. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/ Awak Kapal Perikanan”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Peningkatan Kompetensi & Perlindungan Nelayan	134,69%	13.000.000	13.000.000	17.510.204	4.510.204
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				34,69%	
$= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{574,28\%}{20} \times 50 \right)$				136,73%	

Pencapaian IK 9 didukung oleh anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 13.000.000,00 atau 100% dengan efisiensi 34,69% dan nilai efisiensi 136,73%. Dalam pencapaian IK 9, didukung oleh 7 (tujuh) orang SDM yang terdiri dari 1 (orang) orang syahbandar, 3 (tiga) orang Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan 3 (tiga) orang petugas kesyahbandaran.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Kapal Perikanan yaitu : yaitu program fasilitasi dan pembinaan masyarakat - nelayan / awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan / kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan melalui kegiatan Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan / nelayan.

Sasaran Kegiatan (SK) 7 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) pada SK 7 yaitu :

- Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi; Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indikator Kinerja (IK) 10 - Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja ini merupakan penilaian pembangunan ZI menuju WBK yang mencakup 6 (enam) area pengungkit dan 2 (dua) area komponen hasil yang mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Tabel 25. Capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 10		Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
-	87	78,86	85,15	91,37	80	91,84	114,80%	85	108,05%	

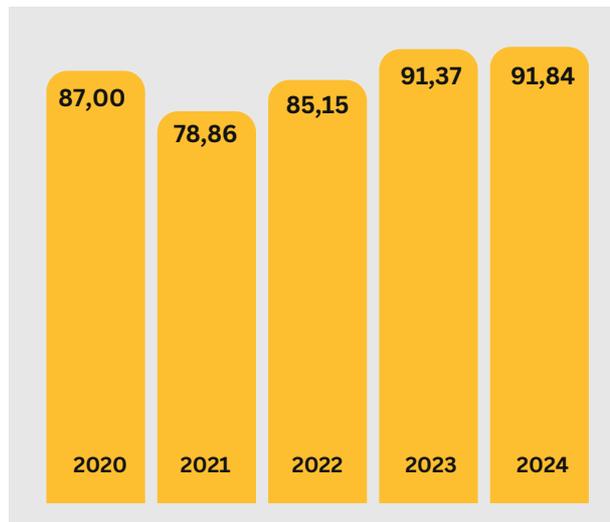
Nilai PM Pembangunan ZI yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 91,84 atau telah melampaui target sebesar 114,80% dari target tahun 2024. Nilai capaian PM Pembangunan ZI ini merupakan jumlah nilai dari komponen pengungkit dan komponen hasil yang terdiri dari :

- Komponen Pengungkit (60%) yang dibagi menjadi Pemenuhan (30%) dan Reform (30%), yang terdiri dari Manajemen Perubahan 5%, Penataan Tatalaksana (5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%), Penguatan Pengawasan (15%); Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)
- Komponen Hasil (40%) yang terdiri dari Birokrasi yang bersih dan akuntabel (20%) serta pelayanan publik yang prima (20%).

Tabel 26. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024

PENILAIAN		BOBOT	NILAI	%
A	PENGUNGKIT	60,00	55,73	
	I. PEMENUHAN	30,00	27,73	92,42%
	1. Manajemen Perubahan	4,00	3,77	94,16%
	2. Penataan Tata Laksana	3,50	3,08	88,10%
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,64	92,84%
	4. Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00%
	5. Penguatan Pengawasan	7,50	6,43	85,69%
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,81	96,13%
	II. REFORM	30,00	28,01	93,35%
	1. Manajemen Perubahan	4,00	4,00	100,00%
	2. Penataan Tata Laksana	3,50	2,67	76,24%
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,25	85,00%
	4. Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00%
	5. Penguatan Pengawasan	7,50	7,50	100,00%
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,59	91,75%
TOTAL PENGUNGKIT			55,73	92,89%
B	HASIL	40,00	36,11	
	I. BIROKRASI YANG BERSIH	22,50	20,97	93,19%
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	17,50	15,97	91,25%
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00%
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	15,14	86,50%
	a. Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50	15,14	86,50%
TOTAL HASIL		40,00	36,11	90,28%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		91,84		

Dibandingkan capaian tahun 2023, capaian nilai PM ZI meningkat pada komponen pengungkit sebesar 0,53 atau 0,95%. Peningkatan terjadi pada komponen pemenuhan area penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan dibandingkan dengan capaian lima tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dengan persentase peningkatan antara 0,51% - 16,46%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan capaian nilai PM ZI WBK tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Nilai PM ZI WBK Tahun 2020 - 2024

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, dimana target akhir tahun yaitu 85 capaian nilai PM Pembangunan ZI telah melebihi target yaitu sebesar 108,05%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 telah diciptakan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan internal seperti pengukuran kinerja dan manajemen SDM, sehingga capaian nilai beberapa area perubahan meningkat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian nilai PM Pembangunan ZI PPN Prigi sebesar 109,09% dimana capaian PPN Palabuhanratu yaitu 84,19.

Peningkatan Nilai PM Pembangunan ZI pada tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

- Keterlibatan anggota dalam menyusun dokumen kelengkapan Pembangunan ZI secara tepat waktu
- Adanya inovasi sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi di PPN Prigi berupa Si CAKEP sehingga terjadi kenaikan nilai pada beberapa Area Perubahan

Faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini yaitu belum banyak inovasi yang diciptakan oleh SDM di PPN Prigi, sehingga pada beberapa Area Perubahan yang mengharuskan adanya inovasi belum bisa mendapatkan nilai maksimal.

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu menggali kembali potensi inovasi yang sesuai dengan kondisi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi. Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain melaksanakan pemantauan pembangunan ZI; melaksanakan kegiatan studi tiru / *benchmarking*; melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dokumen WBK.



Gambar 18. Kegiatan Pemantauan Pembangunan ZI WBK dan Penilaian ZI WBK

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat sebagai berikut.

Tabel 27. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai PM Pembangunan ZI	114,80%	29.410.000	29.322.500	33.762.680	4.440.180
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				15,10%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{21,82\%}{20} \times 50 \right)$				87,74%	

Pencapaian IK 10 didukung oleh anggaran sebesar Rp 29.410.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 29.322.500,00 atau 99,70% dengan nilai efisiensi 15,10% dan nilai efisiensi 104,56%. Dalam pencapaian IK 10, didukung oleh 43 (empat puluh tiga) orang SDM berdasarkan Surat Tugas B.669/PPN.PRG/KP.440/V/2024 tentang Tim Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup PPN Prigi Tahun 2024. Dokumen ZI WBK dikumpulkan melalui *google drive*, sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen serta memudahkan koordinasi tim.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yaitu : yaitu program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP melalui kegiatan Pemantauan dan Pembangunan Zona Integritas.

Indikator Kinerja (IK) 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada audit, revidu, dan evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada triwulan IV 2023 s.d. triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Formula penghitungan yaitu persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diberikan.

Tabel 28. Capaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	100	80	100	125%	75	133,33%

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi pada tahun 2024 yaitu 100% atau 125% dari target yang ditentukan. Rekapitulasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 29. Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024

Pengawasan	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	
Revidu	R.46/ITJ.2/HP.380/II/2024	Hasil Revidu atas Dokumen <i>Addendum</i> Perjanjian Pemanfaatan Tanah PPN Prigi oleh PT Daya Mitra Telekomunikasi	1	1	-	1	1	-	Tuntas
Revidu	R.54/ITJ.2/HP.380/III/2024	Revidu Dokumen Perencanaan Teknis Peningkatan Gudang Keranjang/ Trays, Peningkatan Pagar Kawasan, dan Pembangunan Rambu Suar/ Navigasi TA 2024 pada PPN Prigi	2	3	-	2	3	-	Tuntas
Revidu	101/ITJ.2/HP.380/V/2024	Laporan Hasil Revidu atas Usulan Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan Cara Pemusnahan pada Satker Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, di Provinsi DKI Jakarta	1	1	-	1	1	-	Tuntas

Lanjutan Tabel 29. Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024

Pengawasan	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Ket
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	
Reviu	R.219/ITJ.2/HP.130/V III/2024	Hasil Audit Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Prov Jawa Timur Tahun Anggaran 2023-2024	7	18	13.474.330	7	8	13.474.330	Tuntas
Jumlah			11	23	13.474.330	11	23	13.474.330	Tuntas

Pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP lingkup PPN Prigi. Berdasarkan rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan pada tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) temuan dan 23 (dua belas) saran serta nilai keuangan Rp 13.474.330,00 yang telah ditindaklanjuti secara keseluruhan, sehingga tidak terdapat sisa temuan, rekomendasi, dan nilai keuangan yang perlu ditindaklanjuti.

Capaian tahun 2024 sama dengan capaian tahun sebelumnya (100%), dimana setiap temuan, rekomendasi, dan nilai keuangan telah ditindaklanjuti. Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra kedua 2023) dimana target akhir tahun yaitu 75, capaian tahun 2023 sebesar 133,33%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian PPN Palabuhanratu, capaian PPN Prigi sebesar 100%.

Faktor pendukung capaian kinerja ini yaitu adanya tindak lanjut temuan dan/atau saran pada laporan hasil pengawasan secara tepat waktu serta koordinasi dengan Itjen terkait penyelesaian permasalahan. Secara umum, tidak ada kendala dalam pencapaian target kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan yaitu melakukan koordinasi terus menerus kepada Inspektorat Jenderal KKP dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan.



Gambar 19. Kegiatan Pengawasan Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal KKP

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat sebagai berikut.

Tabel 30. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan u/ Perbaikan Kinerja	125%	6.400.000	6.399.480	8.000.000	1.600.520
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				25,01%	
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$ = $50\% + \left(\frac{1,06\%}{20} \times 50\right)$				112,52%	

Pencapaian IK 11 didukung oleh anggaran sebesar Rp 6.400.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 6.399.480,00 atau 99,99% dengan efisiensi 25,01% dan nilai efisiensi 112,52%. Kegiatan koordinasi dan konsultasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dilakukan secara *online* dan pemenuhan dokumen diunggah pada *google drive* sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan manajemen kinerja internal.

Indikator Kinerja (IK) 12 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rekonsiliasi kinerja merupakan proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah aspek kepatuhan (bobot 25%), aspek kesesuaian (bobot 25%), aspek ketercapaian (bobot 30%), dan aspek ketepatan (20%).

Capaian indikator kinerja ini dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024.

Tabel 31. Capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

SK 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi							
IK 12		Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)							
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	99,44	93	98,63	104,93%	93	104,93%

Kegiatan rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Capaian nilai rekonsiliasi kinerja tahun 2024 yaitu 98,63 atau 104,93%. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian pada LK Rekonsiliasi Kinerja yaitu kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan. Pada aspek kesesuaian, dan ketepatan memiliki skor per aspek 100. Sedangkan pada aspek ketercapaian sebesar 114,51. Aspek ketercapaian merupakan rata-rata capaian NPSS satker triwulan I s.d. III pada tahun berjalan. Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 32. Rekapitulasi Lembar Kerja Rekonsiliasi Kinerja PPN Prigi Tahun 2024

ASPEK	BOBOT	NILAI MAKSIMAL	SKOR PER ASPEK	SKOR DIKALI BOBOT
Kepatuhan (dinilai dari kepatuhan penyediaan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja)	25%	25	100	25
Kesesuaian (dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan)	25%	25	100	25
Ketercapaian (dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi Kinerjaku KKP))	30%	30	114,51	28,63
Ketepatan (dinilai dari ketepatan waktu pelaporan atas LKj ke atasan dan pelaporan dokumen ke aplikasi e-SakipReviu Kemenpan RB)	20%	20	100	20
Total Skor				98,63

Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 atau 0,81%. Penurunan terjadi pada aspek ketercapaian, dimana pada tahun 2023 rata-rata NPSS sebesar 117,77% dengan skor 29,44 sedangkan pada tahun 2024 rata-rata NPSS sebesar 114,51% dengan skor 28,63. Penurunan capaian kinerja unit kerja / NPSS disebabkan oleh meningkatnya target pada sebagian besar indikator kinerja.

Jika dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra kedua 2023), dimana target akhir tahun yaitu 93, capaian IK rekonsiliasi kinerja tahun 2024 sebesar 104,93%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar

99,92%, dimana capaian PPN Palabuhanratu sebesar 98,71. PPN Palabuhanratu memiliki rata-rata NPSS lebih tinggi daripada rata-rata NPSS PPN Prigi (114,85%).

Keberhasilan dan kegagalan indikator kinerja ini ditentukan oleh : Kepatuhan dokumen kinerja, kesesuaian, ketercapaian target indikator kinerja, dan ketepatan penyampaian LKJ Tahunan pada aplikasi ESR; Pemanfaatan hasil monev kinerja sebagai umpan balik perbaikan / peningkatan akuntabilitas kinerja. Secara umum, tidak ada kendala dalam penemuan target indikator kinerja ini.

Upaya yang telah dan akan dilaksanakan antara lain : 1) Perencanaan target indikator kinerja serta melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait; 2) Melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan peraturan / perundang-undangan yang berlaku; 3) Meningkatkan kualitas perencanaan, pengumpulan, pengukuran, dan evaluasi kegiatan..

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 33. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Rekonsiliasi Kinerja	104,93%	55.000.000	54.805.210	57.709.043	2.903.833
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				5,28%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{7,58\%}{20} \times 50)$				63,20%	

Pencapaian IK 12 didukung oleh anggaran sebesar Rp 55.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp 54.805.210,00 atau 99,65% dengan efisiensi 5,28% dan nilai efisiensi 63,20%. Berdasarkan Surat Tugas No.196/PPN.PRG/KP.440/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Tim Pengelola Kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, SDM yang menangani pengelolaan kinerja sebanyak 10 (sepuluh) orang. Untuk memudahkan kegiatan pengumpulan dan pengukuran dan pelaporan kinerja, pengumpulan data capaian dan analisisnya dilakukan menggunakan *google spreadsheet* yang terintegrasi dengan *dashboard* Capaian Kinerja PPN Prigi (Si Cakep) yang mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pemenuhan dokumen diunggah pada google drive, sehingga lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia maupun waktu penyelesaiannya.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 13 - Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Terdapat penyesuaian / perubahan cara perhitungan IP ASN sesuai dengan surat BKN 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 15 September 2023 tentang pengukuran IP-ASN. Perubahan formula perhitungan sebagai berikut :

- Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
- Diklat 20JP dihitung secara proposional;
- Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja;
- Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.

Tabel 34. Capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 13 Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
72	74	80,29	82,12	90,62	84	92,04	109,57%	78	118%

Capaian Indeks Profesionalitas ASN PPN Prigi tahun 2024 yaitu 92,62 dari target 84 atau 109,57% dari target tahun 2024. Hal ini disebabkan karena dari total pegawai PNS yang dihitung sebanyak 51 (lima puluh satu) orang pegawai, 29 (dua puluh sembilan) orang diantaranya memiliki kategori capaian Sangat Tinggi. Sedangkan 22 (dua puluh dua) orang memiliki kategori Tinggi.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian IP ASN tahun 2024 meningkat sebesar 1,42 atau 1,57%. Kenaikan cenderung tidak signifikan mengingat pada tahun 2024 terdapat penurunan jumlah pegawai. Pada tahun 2023 tercatat terdapat 55 orang PNS dengan rincian 21 orang (38,18%) dalam Kategori Sangat Tinggi. Sementara pada tahun 2024 tercatat terdapat 51 orang pegawai dengan rincian 29 orang (56,86%) dengan Kategori Sangat Tinggi. Selisih jumlah pegawai pada tahun 2023 dengan tahun 2024 sebesar 4 orang merupakan JFT dengan tingkat pendidikan S1 dengan status mutasi.

Capaian IP ASN tahun 2024 merupakan capaian tertinggi dibandingkan dengan capaian lima tahun sebelumnya. Peningkatan capaian berkisar antara 1,42 - 20,04 atau 1,97% - 22,11%. Peningkatan capaian ini merupakan output dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian IP ASN secara berkala.



Gambar 16. Perbandingan Capaian Indeks Prestasi ASN Tahun 2019 - 2024

Dibandingkan dengan target Renstra, capaian IP ASN tahun 2024 sebesar 118%. Sedangkan dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian IP ASN PPN Prigi sebesar 101,57% dimana capaian IP ASN PPN Palabuhanratu sebesar 90,62. Jumlah pegawai PPN Prigi 3 (tiga) orang atau 4,08% lebih banyak dari jumlah pegawai PPN Palabuhanratu. Faktor pendukung lainnya yaitu PPN Prigi memiliki persentase jumlah pegawai dengan nilai IP ASN kategori Sangat Tinggi yang lebih tinggi. Persentase jumlah pegawai dengan IP ASN Sangat Tinggi pada PPN Prigi sebesar 56,86%, sedangkan PPN Palabuhanratu sebesar 55,10%. Selain PPN Prigi juga memiliki jumlah pegawai JFT lebih banyak (70,59% dibandingkan JFT PPN Palabuhanratu), berdasarkan hasil penilaian kinerja, PPN Prigi memiliki jumlah pegawai dengan penilaian Sangat Baik sebanyak 15 (lima belas orang) atau 29,41%. Sedangkan PPN Palabuhanratu memiliki jumlah pegawai dengan penilaian kinerja Sangat Baik sebanyak 1 (satu) orang atau 2,04%.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja nilai IP ASN PPN Prigi antara lain :

- Peningkatan jumlah pegawai dengan IP ASN kategori Sangat Tinggi;
- Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan IP ASN, baik melalui penyampaian apel pagi maupun dialog kinerja lainnya, penyampaian memorandum peningkatan kompetensi, penyelenggaraan pelatihan bekerjasama dengan BDA Sukamandi, dll;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja nilai IP ASN PPN Prigi antara lain :

- Jenis pelatihan yang tersedia belum menjawab seluruh kebutuhan JFT dan JFU sehingga mengurangi minat pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan;
- Perpindahan sejumlah pegawai JFT dengan tingkat pendidikan S1 pada tahun 2024 sebanyak 4 orang membuat penilaian IP ASN pegawai belum maksimal;
- Pegawai belum mengikuti program pelatihan yang telah disusun sehingga masih ada beberapa pegawai yang memiliki GAP.

Upaya atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- Menyusun program pelatihan per pegawai dengan mengacu pada program pelatihan yang ada di emilea yang disesuaikan pada jenis dan jenjang jabatan;
- Membuat slogan atau flyer terkait kedisiplinan dan kinerja sebagai upaya peningkatan kedisiplinan dan kinerja sehingga dapat meningkatkan IP ASN.

Sebagai upaya peningkatan IP ASN, pada tahun 2024 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan beberapa upaya antara lain :

- Penyusunan kebijakan pelatihan pegawai berupa Memorandum tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai tanggal 7 Oktober 2024. Memorandum ini berupa arahan kepada pegawai untuk mengikuti sejumlah kegiatan *microlearning* melalui *website e milea*. Kegiatan pelatihan yang dimaksud telah disesuaikan berdasarkan jenjang jabatan. Memorandum ini selain bentuk upaya peningkatan IP ASN juga merupakan tindak lanjut dari penyusunan HCDP Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi;
- Penyelenggaraan pelatihan internal bekerjasama dengan BDA Sukamandi pada tanggal 26 - 27 Oktober 2024 (kategori : Diklat 20 JP).



Gambar 21. Bimbingan Teknis Integritas ASN dalam Pelayanan Prima

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 35. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
IP ASN	109,57%	9.123.216.000	9.116.227.421	9.996.438.103	880.210.682
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$				20,68%	
= $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$					
Nilai Efisiensi = $50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50\right)$				74,12%	
= $50\% + \left(\frac{10,07\%}{20} \times 50\right)$					

Pencapaian IK 13 didukung oleh anggaran sebesar Rp 9.123.216.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 9.116.227.421,00 atau 99,92% dengan efisiensi 20,68% dan nilai efisiensi 74,12%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 51 (lima puluh satu) orang ASN. Selain itu, didukung oleh 2 (dua) orang Analis Kepegawaian yang bertugas melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, monitoring dan evaluasi, input data capaian pengembangan kompetensi pada aplikasi SIASN serta evaluasi tingkat kedisiplinan pada masing - masing pegawai.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen internal – layanan perkantoran dan layanan manajemen SDM internal, meliputi kegiatan : pembayaran gaji dan tunjangan; pembinaan dan pengembangan SDM, penguatan integritas dan kinerja pegawai.

Indikator Kinerja (IK) 14 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kepatuhan pengadaan barang / jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Rencana umum pengadaan telah diupload dapal aplikasi SIRUP (20%)
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
- Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Tabel 36. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	96,29	92,90	98,35	80	96,29	120,36%	72,25	133,27%

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa PPN Prigi tahun 2024 sebesar 96,29% atau 120,36% dari target tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa di masing-masing Satker menggunakan capaian Eselon I (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap).

Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain :

- Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Staregis Unit Eselon I;
- Perencanaan dan persiapan pengadaan;
- Persentase pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan melalui SPSE;
- Kesesuaian tahap pelaksanaan;
- Laporan penyelenggaraan PBJ;

- Laporan penyelenggaraan PBJ;
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I triwulan I s.d. triwulan III tahun 2024.

Terkait dengan pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian indikator kinerja dimaksud pada tahun berikutnya :

- Mengumumkan seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- Melaksanakan proses pengadaan barang / jasa paling lambat triwulan I tahun berjalan;
- Menyiapkan dokumen tender (KAK, HPAS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak), pengadaan barang dan jasa dengan kontrak / Surat Perjanjian sejak periode akhir tahun anggaran sebelumnya (T-1) sehingga paket pengadaan barang dan jasa dapat segera dikontrakkan pada kesempatan pertama;
- Menyelesaikan kontrak / surat perjanjian PBJ tepat waktu;
- Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

Tabel 37. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1	2	3	4	5	6	
1	Setjen	10,00	11,65	10,00	37,46	5,00	15,00	89,11
2	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	35,66	3,75	15,00	87,76
3	DJPT	10,00	15,00	10,00	41,29	5,00	15,00	96,29
4	DJPSDKP	10,00	10,40	10,00	34,65	5,00	15,00	85,05
5	DJPB	6,67	15,00	10,00	31,84	3,75	15,00	82,24
6	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	30,94	5,00	15,00	84,29
7	DJPDSPKP	10,00	13,35	10,00	31,84	5,00	15,00	85,19
8	BPPMHKP	10,00	13,75	10,00	31,84	3,75	15,00	84,34
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	5,00	0,00	85,00

Keterangan :

1. Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang / Jasa Staregis Unit Eselon I
2. Perencanaan dan persiapan pengadaan;
3. Persentase pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan melalui SPSE;
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan;
5. Laporan penyelenggaraan PBJ;
6. Laporan penyelenggaraan PBJ;
7. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I triwulan I s.d. triwulan III tahun 2024

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 38. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan PBJ	120,36%	725.861.200	723.522.000	873.664.446	150.142.246
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(5)} \times 100\%$				20,68%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{24\%}{20} \times 50)$				101,71%	

Pencapaian IK 14 didukung oleh anggaran sebesar Rp 725.861.200,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 723.522.000,00 atau 99,68% dengan efisiensi 20,68% dan nilai efisiensi 101,71%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Pengelola Barang/ Jasa.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program dukungan manajemen melalui kegiatan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, operasional perkantoran - pengadaan pakaian dinas, pengadaan sarana perkantoran, peralatan perkantoran dalam mendukung PNBK Pasca Produksi, serta layanan prasarana internal.

Indikator Kinerja (IK) 15 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 10%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 balik ke penggunaan barang dan pengelolaan barang (bobot 25%)
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (reevaluasi aset) (bobot 20%)
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian (Bobot 25%)
- Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%)

Tabel 39. Capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	90	90	95	80	90	112,50%	72,25	124,57%

Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN PPN Prigi tahun 2024 sebesar 90% atau 112,50% dari target tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di masing-masing Satker menggunakan capaian Eselon I (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap).

Capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada masing-masing unit eselon I lingkup KKP dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain :

- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan / penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil evaluasi Itjen, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup KKP mencapai nilai rata-rata sebesar 93,78%. Adapun rincian capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dari masing-masing unit eselon I sebagai berikut.

Tabel 35. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2024

No	Unit Eselon I	Target	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN (%)
1	Sekretariat Jenderal	82,50	94,00
2	Ditjen PKRL	80,00	100,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	80,00	90,00
4	Ditjen PSDKP	80,00	100,00
5	Ditjen PB	80,00	87,50
6	BPPSDMKP	80,00	90,00
7	Ditjen PDSPKP	80,00	87,50
8	BPPMHKP	80,00	97,50
9	Inspektorat Jenderal	82,00	97,50

Sumber : Hasil Evaluasi Itjen KKP pada Unit Eselon I lingkup KKP

Terkait dengan pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian indikator kinerja dimaksud pada tahun berikutnya :

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L);
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Serah Tereima (BAST) / Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 41. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	112,50%	4.035.800.000	3.998.319.008	4.540.275.000	541.955.992
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				13,43%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{22,99\%}{20} \times 50)$				83,57%	

Pencapaian IK 15 didukung oleh anggaran sebesar Rp 4.035.800.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 3.998.319.008,00 atau 99,07% dengan efisiensi 13,43% dan nilai efisiensi 83,57%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 3 (tiga) orang pejabat Pengelola BMN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - operasional dan pemeliharaan kantor melalui kegiatan pemeliharaan alat pengolah data, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, jasa pos / giro, operasional perkantoran dan pimpinan, pemeliharaan gedung dan bangunan, serta operasional perkantoran.

Indikator Kinerja (IK) 16 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek IKPA dan sasaran perbaikan kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek dan 8 (delapan) indikator.

Tabel 42. Aspek IKPA dan Sasaran Perbaikan Kinerja

No	Aspek IKPA & Sasaran Perbaikan Kinerja	Nilai Kepatuhan Pengelolaan BMN (%)
I	Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	
1	Revisi DIPA (10%)	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulan
2	Deviasi Halaman III DIPA (10%)	Meningkatkan akurasi / ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per bulan
II	Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	
3	Penyerapan Anggaran (20%)	Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan
4	Belanja Kontraktual (10%)	Mendorong penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal
5	Penyelesaian Tagihan (10%)	Mendorong percepatan pelaksanaan belanja kontraktual
6	Pengelolaan UP dan TUP (10%)	Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP
7	Dispensasi SPM (5%)	Meningkatkan ketepatan waktu pembayara tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
III	Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran	
8	Capaian Output (25%)	Mendorong akselerasi pencapaian output berkualitas

Capain nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 yaitu 98,65 atau 105,21% dari target tahun 2024. Dari keseluruhan indikator, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai nilai maksimal, yaitu indikator penyerapan anggaran (98,35%) dan indikator deviasi halaman III DIPA (93,16).

Tabel 43. Capaian IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	99,16	95,14	95,09	94,64	93,76	98,65	105,21%	90	109,61%

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga IKPA PPN Prigi dalam kategori SANGAT BAIK karena berada dalam rentang nilai IKPA ≥ 95 .



Gambar 18. Perbandingan Capaian Nilai IKPA PPN Prigi Tahun 2020 - 2024

Dibandingkan dengan capaian tahun 2023, capaian tahun 2024 meningkat. Peningkatan terjadi pada beberapa 4 (empat) indikator, antara lain :

- Deviasi Halaman III DIPA meningkat sebesar 25,23% dari 74,39 menjadi 93,16
- Penyerapan Anggaran meningkat sebesar 8,53% dari 90,63 menjadi 98,36
- Belanja Kontraktual meningkat sebesar 3,09% dari 97 menjadi 100
- Pengelolaan UP dan TUP meningkat sebesar 6,64% dari 93,77 menjadi 100

Jika dibandingkan dengan target Renstra, dimana target akhir tahun yaitu 90 capaian nilai IKPA PPN Prigi tahun 2024 sebesar 109,61%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi sebesar 100,61%, dimana capaian nilai IKPA PPN Palabuhanratu sebesar 98,05.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu :

- Meningkatkan kualitas perencanaan;
- Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
- Melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan percepatan Pelaksanaan PBJ, tepat waktu dalam pencapaian data kontrak;
- Percepatan pelaksanaan belanja kontraktual;
- Ketepatan waktu penyampaian UP/TUP;
- Ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja;
- Mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran, dan
- Akselerasi pencapaian output yang berkualitas.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu :

- Tidak konsisten dan komitmen untuk melakukan realisasi penyerapan sesuai target di dalam Halaman III DIPA;
- Kurang presisinya penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target Triwulan IKPA dikarenakan kurang memahaminya seluruh pelaksana kegiatan terkait realisasi per jenis belanja.

Upaya yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya antara lain :

- Menyusun RPD disesuaikan dengan kemampuan untuk melaksanakannya per jenis belanja;
- Melakukan pemantauan secara berkala capaian realisasi terhadap rencana RPD Halaman III DIPA per jenis belanja;
- Melakukan Akselerasi pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban tepat waktu sehingga dengan cepat proses *revolving* UP/TUP maupun LS.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 yaitu melakukan revisi halaman III sesuai batas waktu yang ditentukan dan dilakukan penyesuaian target serapan anggaran sesuai perhitungan target serapan setiap triwulan; melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi serapan anggaran; melaksanakan pendaftaran kontrak, penyelesaian tagihan revolving UP dan GUP serta mengajukan SPM dilakukan tepat waktu; serta pengisian capaian *output* dilakukan tepat waktu dan capaian realisasi *output* sesuai atau diatas target yang ditetapkan setiap triwulan.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 44. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai IKPA	105,22%	56.105.000	55.988.522	59.031.125	3.042.603
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				5,42%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{9,2\%}{20} \times 50)$				63,56%	

Pencapaian IK 16 didukung oleh anggaran sebesar Rp 56.105.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi anggaran sebesar Rp 55.988.522,00 atau 99,79% dengan efisiensi 5,42% dan nilai efisiensi 63,56%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Pengelola Keuangan, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN dan 2 (dua) orang Analis Pengelola Keuangan APBN.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - kegiatan pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap melalui kegiatan laporan keuangan dan BMN.

Indikator Kinerja (IK) 17 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan salah satu instrumen penggambaran berbasis kinerja yaitu pertanggungjawaban secara profesional kepada *stakeholder* atas penggunaan anggaran (*proving*) serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan relevansi informasi kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala dalam rangka peningkatan kinerja dan penyusunan kebijakan.

Formula penghitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja sebagai berikut :

- Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) (RO pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level Unit Eselon I, dan capaian indikator kinerja Sasaran Strategis pada level K/L);
- Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks Standar Biaya Keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Tabel 45. Capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi									
IK 17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi	
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra
-	-	-	-	-	71	90	126%	-	-

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yaitu 90 atau 126% dari target tahun 2024. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara / Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Jika dikonversi dengan kategori penilaian dalam PMK 62 tahun 2023, capaian NKPA PPN Prigi memiliki kategori Baik, dimana nilai berkisar antara $80 < \text{NKPA} \leq 90$.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga analisis perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dan target Renstra tidak dapat dilakukan. Jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), target dan capaian indikator NKPA PPN Prigi memiliki nilai yang sama. Hal ini disebabkan nilai efektivitas (capaian RO) dan efisiensi (penggunaan SBK dan efisiensi SBK) antara PPN Prigi dengan PPN Palabuhanratu sama.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini anatra lain :

- Peningkatan variabel efektivitas satker melalui peningkatan Capaian Rincian Output;
- Peningkatan variabel efisiensi berdasarkan perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks Standar Biaya Keluaran (SBK).

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu : Realisasi volume tidak sesuai dengan target volume (nilai capaian RO pada variabel efektivitas); Penggunaan SBK tidak terdapat pada setiap RO (nilai penggunaan SBK pada variabel efisiensi); Ketidaksiesuaian antara indeks SBK RO dengan PMK SBK (nilai penggunaan SBK pada variabel efisiensi) kualitas perencanaan anggaran; Nilai indeks RA SBK lebih besar daripada indeks SBK RO sesuai dengan PMK SBK (nilai efisiensi SBK pada variabel efisiensi).

Upaya yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dengan meningkatkan efektivitas (peningkatan CRO) dan efisiensi (kesesuaian antara indeks realisasi anggaran dengan indeks SBK), serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 46. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) – (4)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	126,76%	78.985.000	78.798.732	100.121.831	21.323.099
$\text{Efisiensi RO Satker} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ $= \frac{\sum(6)}{\sum(3)} \times 100\%$				27%	
$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left(\frac{E_{RO}}{20} \times 50 \right)$ $= 50\% + \left(\frac{6,37\%}{20} \times 50 \right)$				117,49%	

Pencapaian IK 17 didukung oleh anggaran sebesar Rp 78.985.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 78.798.732,00 atau 99,76% dengan efisiensi 27% dan nilai efisiensi 117,49%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 2 (dua) orang Pengelola Keuangan.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen keuangan - monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja (IK) 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/ Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/ Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

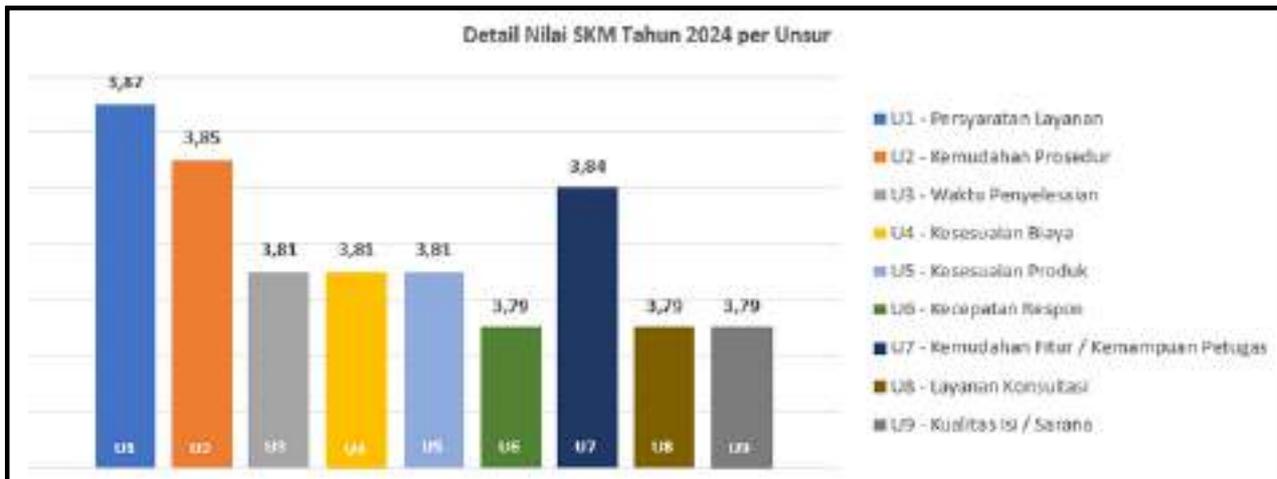
Tabel 47. Capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” Tahun 2024

SK 7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi								
IK 18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Target & Realisasi Tahun 2024			Renstra PPN Prigi		
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target	Realisasi	% Realisasi thd Target	Target Renstra 2024	% thd Target Akhir Renstra	
82	83	85	86,37	90,11	88,30	93,22	105,57%	88,21	105,67%	

Capaian indikator kinerja SKM tahun 2024 yaitu 93,22 dengan kategori “Sangat Baik” atau 105,57% dari target tahun 2024 dimana target tahun 2024 sebesar 88,30. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, tetapi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selalu dilakukan secara periodik. Tujuan pelaksanaan SKM yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, serta mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Tabel 48. Detail Nilai SKM per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per Unsur	3,87	3,85	3,81	3,81	3,81	3,79	3,84	3,79	3,79
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,22 (A atau Sangat Baik)								



Gambar 19. Detail Nilai Survei Kepuasan Masyarakat per Unsur Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisa Indeks Kepuasan Masyarakat pada triwulan IV 2024, unsur dengan nilai tertinggi adalah :

- Persyaratan Pelayanan
Hal tersebut dikarenakan telah dilaksanakan publikasi dan sosialisasi terkait persyaratan pelayanan yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi sehingga pengguna jasa mengetahui dan memahami persyaratan pelayanan yang dibutuhkan.
- Kemudahan Prosedur
Hal tersebut dikarenakan pelayanan yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan SOP sehingga pengguna jasa mendapatkan pelayanan yang sesuai.
- Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas
Hal tersebut dikarenakan petugas pelayanan telah mengikuti diklat / bimtek untuk meningkatkan kompetensi sesuai tupoksi. Selain itu, semua petugas telah mengikuti Bimtek Pelayanan Prima.

Sedangkan unsur layanan dengan nilai terendah berdasarkan hasil analisa indeks survey kepuasan masyarakat adalah :

- Kecepatan Respon
- Sarana dan Prasarana
- Layanan Konsultasi
Kurangnya sosialisasi terkait media layanan pengaduan / konsultasi di PPN Prigi. PPN Prigi mempunyai media konsultasi yaitu SIPARI, tetapi kurang maksimal dalam pemanfaatannya. Terkait dengan ruang pengaduan, *stakeholder* mengeluhkan petugas aduan yang tidak selalu berada di ruang pengaduan.

Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat pada triwulan IV 2024 sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang. Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi berdasarkan periode survei sebelumnya.



Gambar 24. Perbandingan Capaian Nilai SKM Tahun 2019 - 2024 pada PPN Prigi

Capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2024 merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana peningkatannya berkisar antara 3,11 - 11,22 atau 3,45% - 11,22%. Berdasarkan Gambar 24, dapat dilihat bahwa nilai SKM dari tahun 2019 s.d. tahun 2024 menunjukkan tren nilai naik.

Dibandingkan dengan target Renstra (Reviu Renstra kedua 2023), dimana target nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu 88,21 capaian nilai (SKM) tahun 2024 sebesar 105,67%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian Satker lain (PPN Palabuhanratu), capaian PPN Prigi lebih rendah yaitu sebesar 98,35%, dimana capaian nilai SKM PPN Palabuhanratu sebesar 94,78.

Faktor pendukung tercapainya indikator kinerja ini yaitu :

- Adanya pelaksanaan sosialisasi dan publikasi terkait persyaratan pelayanan;
- Setiap pelayanan mempunyai Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dilaksanakan sesuai SP dan SOP;
- Seluruh petugas pelayanan telah mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan Prima sehingga mendukung unsur kemudahan fitur / kemampuan petugas.

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini yaitu Kurangnya sosialisasi terkait media layanan pengaduan / konsultasi di PPN Prigi; Belum dilaksanakan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan; Kecepatan respon petugas pada beberapa jenis layanan dinilai masih kurang.

Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya antara lain :

- Melaksanakan pembinaan terhadap petugas pelayanan agar melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik layanan;
- Melaksanakan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang memerlukan pengaduan.

Sedangkan upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu peningkatan fasilitas Pos Pelayanan Terpadu; Publikasi Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan; Evaluasi kinerja pelayanan publik; Surveillance ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; Reviu Standar Pelayanan dan Tindak Lanjut Hasil SKM.



Gambar 25. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Surveillance ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian kinerja, diperlukan sumberdaya pendukung yang tepat dan efisien. Sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu anggaran dan sumber daya manusia (SDM). Efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung capaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi” dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 49. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi”

RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) X (2)	(6) = (5) - (4)
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	105,57%	2.590.000	2.580.000	2.734.313	154.313
Efisiensi RO Satker = $\frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$ = $\frac{\Sigma(6)}{\Sigma(3)} \times 100\%$				5,96%	
Nilai Efisiensi = $50\% + (\frac{E_{RO}}{20} \times 50)$ = $50\% + (\frac{2,03\%}{20} \times 50)$				64,90%	

Pencapaian IK 18 didukung oleh anggaran sebesar Rp 2.590.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi anggaran sebesar Rp 2.580.000,00 atau 99,61% dengan efisiensi 5,96% dan nilai efisiensi 64,90%. Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh Pencapaian IK ini didukung oleh 32 (tiga puluh dua) orang petugas pelayanan publik berdasarkan Surat Tugas Nomor B.53/PPN.PRG/KP.440/I/2024. Penggunaan aplikasi SISUSAN meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan SKM, baik dari segi SDM maupun waktu.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Indikator Kinerja di atas yaitu program layanan dukungan manajemen internal - layanan organisasi dan tata kelola internal melalui kegiatan forum konsultasi publik.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di PPN Prigi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 15.824.634.000,00 sesuai dengan DIPA PPN Prigi TA.2024 dengan nomor DIPA : SP DIPA-032.03.2.427670/2024 tanggal 24 November 2023. Anggaran tersebut terbagi dalam 5 (lima) kegiatan utama sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan
5. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Capaian pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp 15.824.634.000,00 atau sebesar 99,52% dari total PAGU Anggaran Tahun 2024.

Tabel 50. *Penyerapan Anggaran berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Utama Tahun 2024*

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	37.025.408	97,44%
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.621.527.000	1.594.792.182	98,35%
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	3.985.000	99,63%
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.740.000	37.541.438	99,47%
5	Program Dukungan Manajemen Internal	14.123.367.000	14.075.901.573	99,66%
	Jumlah	15.824.634.000	15.749.245.601	99,52%

Target anggaran yang ditetapkan, direncanakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 51. *Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024*

No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Th.2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
1	Nilai PNBPN sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di PPN Prigi	185.092.000	184.375.000	120,00%	99,61%
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Prigi Meningkatkan	10.000.000	9.938.500	104,35%	99,39%

Lanjutan Tabel 51. Penyerapan Anggaran berdasarkan Sasaran Kegiatan Tahun 2024

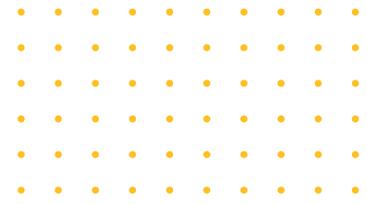
No	Sasaran Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2024	Realisasi Anggaran Th.2024 (Rp)	NPSS	% Realisasi Anggaran
3	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di PPN Prigi	634.452.000	611.570.003	110,95%	96,39%
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	843.723.000	840.373.617	112,00%	99,60%
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	25.000.000	24.025.408	120,00%	96,10%
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi / Terlindungi di PPN Prigi	13.000.000	13.000.000	120,00%	100,00%
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan PPN Prigi	14.113.367.000	14.065.963.073	112,50%	99,66%
Jumlah / Persentase		15.824.634.000	15.749.245.601	114,26%	99,52%



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP



4.1. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Pengelolaan Perikanan yang berkelanjutan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran program dan target pada Indikator Kinerja selama tahun 2024. Terhadap capaian Indikator Kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi, serta perbandingan terhadap target tahunan dan capaian Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, target akhir Renstra, dan capaian satker lain yang memiliki karakteristik hampir sama sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan. Capaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024 secara keseluruhan dinyatakan tercapai.

Pada tahun 2024, memiliki kategori "ISTIMEWA", ditandai dengan Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 114,26% dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 114,16%. Berdasarkan target pada rencana aksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang mendukung 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan memiliki capaian >100%.

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi terdapat beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Perlu adanya sinkronasi data berkala terkait jasa tambat dan labuh;
- Tingkat ketelitian operator dalam penyampaian data perlu ditingkatkan (*human error*);
- Diperlukan upaya peningkatan kedisiplinan dan kinerja pegawai;
- Tidak konsisten dan komitmen untuk melakukan realisasi penyerapan sesuai target di dalam Halaman III DIPA
- Kurangnya sosialisasi terkait media layanan pengaduan / konsultasi di PPN Prigi;
- Belum dilaksanakan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan;
- Kecepatan respon petugas pada beberapa jenis layanan dinilai masih kurang.

Hal ini menunjukkan perlu upaya yang lebih besar untuk dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan pada periode selanjutnya. Upaya-upaya dimaksud disampaikan pada langkah-langkah perbaikan (rekomendasi tindak lanjut).

4.2. Tindak Lanjut Periode Sebelumnya

Rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya (triwulan III tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti pada periode triwulan IV tahun 2024 yaitu :

- Melaksanakan koordinasi dengan nelayan, pengepul, dan stakeholder lainnya dengan tujuan penertiban kegiatan bongkar dan memaksimalkan pendataan hasil tangkapan (lanjutan koordinasi 1);
- Menerbitkan memorandum Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai serta monitoring dan evaluasi secara berkala;
- Melaksanakan publikasi ketentuan pelayanan, media layanan pengaduan, dan proses pengisian SKM secara online, dan lainnya.

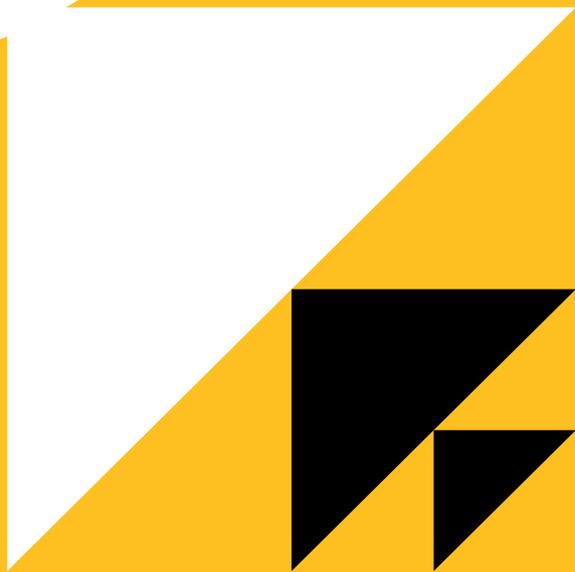
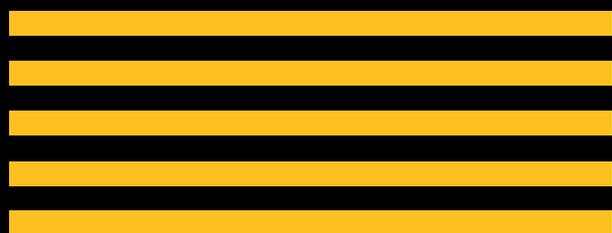
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi tahun 2024, rekomendasi / hal-hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 sebagai berikut :

- Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi data pelayanan jasa tambat dan labuh;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan input data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan;
- Membuat slogan atau *flyer* terkait kedisiplinan dan kinerja;
- Melaksanakan pemantauan secara berkala capaian realisasi terhadap rencana RPD halaman III DIPA per jenis belanja;
- Melaksanakan sosialisasi terkait media layanan pengaduan / konsultasi di PPN Prigi;
- Melaksanakan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan;
- Melaksanakan pembinaan terhadap petugas pelayanan agar melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik layanan melalui penyampaian arahan apel pagi atau dialog kinerja lainnya.



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ririn Sugihariyati**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

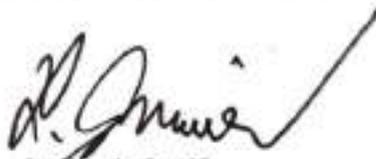
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi


Ririn Sugihariyati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Rp juta)	1.207,96
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi meningkat	2. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Ton)	20.046
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	100
		4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	84
		5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	45
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Optimal	6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	70
		7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	377
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/ Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	9. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan (Persen)	24,5
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	10. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	80
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		12. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	94
		13. Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	84
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang / Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	80
		16. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	93,76
		17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	71
18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Indeks)	88,30		

Data Anggaran :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.621.527.000
3	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	37.740.000
5	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.123.367.000
Total Anggaran Tahun 2024		15.824.634.000

Jakarta, 22 November 2024

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi



Ririn Sugihariyati

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala														
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des			
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi yang Berdaya Saing	5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Persen)	Tim Kerja Kesyahbandaran	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
			051.A. Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan Ikan	600.000	80	Produk	3	6	9	12	15	18	23	28	32	40	46	80			
			2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	051.B.Desiminasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan	37.140.000	1	Kegiatan					1										
			2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
			RBQ.001.052Pelaksanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di PP Perintis untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	600.748.000	1	Unit												1			
	7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi (Nilai)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
			055.A.K5 di Pelabuhan Perikanan	70.666.000	1	Layanan														1	
			2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
			055.B.Gerakan Cinta Laut dalam rangka Mendukung Pengendalian Lingkungan	43.350.000	1	Kegiatan									1						
			2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																		
			055.C. Pemantauan Pengelolaan Lingkungan	48.200.000	1	Layanan															1
8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Keyshbandaran	2338.BGA.002. Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar																			
		2337.ACA. Perizinan Produk	25.000.000																		
		2337.ACA.052.Pemeriksaan kelaikan/pengukuran kapal perikanan	25.000.000	40	Dokumen	2	4	6	8	10	12	14	16	18	23	28	40				
9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan / Awak Kapal Perikanan (Persen)	Tim Kerja Kesyahbandaran	2337.BDC. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	13.000.000																		
		052.A.Bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi awak kapal perikanan/nelayan	13.000.000	1	Kegiatan							1									
10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	32.000.000																		
		053.A.Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	25.000.000	1	Kegiatan														1		
	11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Ttim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan	127.380.000																	
			054.A. Penyusunan PPIK	7.000.000	1	Kegiatan				1											
			2342.EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan	127.380.000																	
			054.A. Penyusunan Manajemen Resiko dan SPIP	7.000.000	1	Kegiatan							1								
11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Ttim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.955.Layanan Manajemen Keuangan	127.380.000																		
		054.A.Perjalanan Penyelesaian dan Evaluasi Tindak Lanjut LHA	7.000.000	1	Kegiatan										1						

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
							Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan PPN Prigi	17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBD.953.053.A Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	37.000.000	1	Kegiatan													1
			2342.EBC.954.055.A. Pelaporan Keuangan Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	57.380.000	1	Kegiatan													
	18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi	Tim Kerja Dukungan Manajerial	2342.EBA.960.053.A Koordinasi terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.000.000	1	Kegiatan						1							
			Jumlah	15.824.634.000															

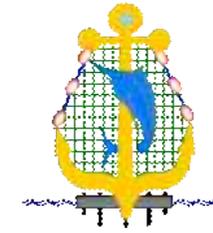


Trenggalek, November 2024
Kepala Pelabuhan

Trim Sugiharyati
NIP. 19671101 199803 2 002



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan Bangga di berikan kepada :

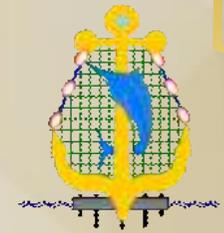
PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan
periode April 2024 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 8 Mei 2024
Direktur
Kepelabuhanan Perikanan

Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada:

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Juni 2024
dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 10 Juni 2024

**Direktur
Kepelabuhanan Perikanan**



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si



S E R T I F I K A T

PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada :

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Mei 2024 dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 10 Juni 2024

**Direktur
Kepelabuhanan Perikanan**



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si





PLAGAM PENGHARGAAN

Nomor : B.3101/DJPT.1/KP.540/VII/2024

diberikan kepada :

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

atas prestasinya sebagai

"Unit Kerja Pengelola Kepegawaian Terbaik II"

Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Jakarta, 01 Juli 2024

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap


TRIAN YUNANDA, S.Pi, M.Sc
NIP. 197406201999031004

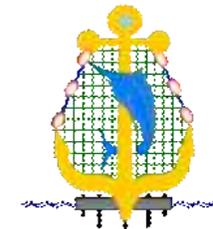
 #2024  KAP BERTANG

Penghargaan Anugerah Terbaik ke I - Kategori Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Semester I TA 2024 Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap





SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Dengan bangga diberikan kepada

PPN Prigi

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Juli 2024
dengan kategori :

SANGAT BAIK

Jakarta, 7 Agustus 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada

PPN PRIGI

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan Agustus 2024
dengan kategori :

Sangat Baik

Jakarta, 7 September 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



Tri Aris Wibowo



SERTIFIKAT

Penghargaan

Diberikan Kepada:

PPN PRIGI

Dengan Kategori :

SANGAT BAIK

Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan
periode bulan September 2024

Jakarta, 7 Oktober 2024

Direktur Kepelabuhanan Perikanan



TRIARIS WIBOWO

SERTIFIKAT

P T. PUTRADUTA BUANASENTOSA



Yang Diberikan Kepada

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

Dimana Selama Kurun Waktu Tahun 2024 Telah Turut Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Dengan Mendaur Ulang Limbah Kertas di INDOARSIP yang Setara Dengan Penyelamatan 6 POHON



Handwritten signature of Didi Andries in black ink.

Didi Andries
Presiden Direktur

Jakarta, 13 Desember 2024



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

menganugerahkan

TANDA PENGHARGAAN

kepada:

**Pelabuhan Perikanan
Nusantara Prigi**

sebagai

Pelabuhan Sehat Tahun 2024

atas Prestasinya dalam Mewujudkan Penyelenggaraan
Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

(Kep. Menkes RI Nomor: HK.01.07/Menkes/1817/2024)

Jakarta, 6 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN,



BUDI G. SADIKIN



Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11102 - A

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI
Jl. Raya Pantai Prigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with

ISO 9001:2015

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Fisheries Port Administration Service

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QAI Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 23 October 2024 - **Re-assessment Date** : 29 November 2025

Date of Initial Registration : 29 November 2017 - **Certificate Expiry Date** : 29 November 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

QAI INDONESIA
CERTIFICATION

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,

Jakarta, 12610

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website QAI: www.qai.co.id

Website Acreditor: www.ascb.com





Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11102 - B

QAI Indonesia Certification

Hereby grants to:

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI

Jl. Raya Pantai Prigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Environmental Management System in compliance with

ISO 14001:2015

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Fisheries Port Administration Service

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 14001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QAI Indonesia

Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 23 October 2024 - **Re-assessment Date** : 20 October 2025

Date of Initial Registration : 20 October 2023 - **Certificate Expiry Date** : 20 October 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

**QAI INDONESIA
CERTIFICATION**

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,

Jakarta, 10310

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website QAI: www.qai.co.id

Website Accreditor: www.ascb.com

